



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	:	2015-2016
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Pakar
Hari, Tanggal	:	Senin, 30 November 2015
Pukul	:	10.45 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Tantowi Yahya
Sekretaris Rapat	:	Wazir, S.E., M.M., Lakhari Kabagset Komisi I DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	:	Mendengarkan Pandangan atau Masukan mengenai RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and its Related Activities</i>)
Anggota yang Hadir	:	PIMPINAN: 1. Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si. (F-PKS) 2. Tantowi Yahya (F-PG) 3. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-GERINDRA) 4. H.A. Hanafi Rais, S.IP, MPP. (F-PAN)

**ANGGOTA:
FRAKSI PDI-PERJUANGAN**

1. Ir. Rudianto Tjen

2. Dr. Effendi MS. Simbolon, MIPol.
3. Bambang Wuryanto
4. Marinus Gea, S.E., M.AK.
5. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comn. & Medias.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

6. H. Firmandez, S.AK.
7. Meutya Viada Hafid
8. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E. AK., MBA., CFE.
9. Bambang Wiyogo, S.E.
10. Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si.
11. Mahyudin
12. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

-

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

13. Mayjen TNI (Purn.) Salim Mengga
14. H. Darizal Basir
15. Dr. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

16. Budi Youyastri (F-PAN)

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

17. Dra. Hj. Ida Fauziah, M.Si.

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

18. Dr. H. M. Gamari Soetrisno

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

19. Dr. H.A. Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.
20. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc.
21. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

22. Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA.

FRAKSI PARTAI HANURA

-

- Anggota yang Izin :
1. Dr. TB. Hasanuddin, SE., MM. (F-PDI Perjuangan)
 2. Charles Honoris (F-PDI Perjuangan)
 3. Evita Nursanty, M.Sc. (F-PDI Perjuangan)

4. Yayat Y. Biaro (F-PG)
5. H. Ahmad Muzani (F-Gerindra)
6. Martin Hutabarat (F-Gerindra)
7. Rachel Maryam Sayidina (F-Gerindra)
8. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc. (F-Gerindra)
9. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si. (F-Gerindra)
10. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., MBA. (F-PD)
11. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. (F-PD)
12. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. (F-PAN)
13. Ir. Alimin Abdullah (F-PAN)
14. H. Muhammad Syafruddin, S.T., M.M. (F-PAN)
15. Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si. (F-PKB)
16. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, MP. (F-PKB)
17. H. Ahmad Zainuddin, LC. (F-PKS)
18. Dr. Sukamta (F-PKS)
19. Letjen TNI (Purn.) H. Andi Muhammad Ghalib, S.H., M.H. (F-PPP)
20. Victor Bungtilu Laiskodat (F-Nasdem)
23. Prananda Surya Paloh (F-Nasdem)
24. M. Arief Suditomo, SH., M.A. (F-Hanura)

Undangan : 1. Kolonel Inf. Dr.rer.pol. Rodon Pedrason, M.A.
 2. Drs. Teuku Rezasyah, M.A.
 3. Dr. Kusnanto Anggoro

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (TANTOWI YAHYA):

***Bismillahirrahmanirrahim,
 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
 Salam sejahtera buat kita semua.***

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI;

Yang kami hormati dan juga sekaligus ucapan selamat datang kepada para Narasumber kami, Bapak Kolonel Infanteri Dr. Rodon Pedrason, M.Si., Bapak Dr. Kusnanto Anggoro, dan Bapak Drs. Teuku Rezasyah atas kedatangannya memenuhi undangan kami sesuai dengan agenda yang sudah kami sampaikan. Sebagaimana yang kita sepakati bersama, bahwa agenda tunggal kita dalam RDPU Komisi I DPR RI dengan Bapak-Bapak sekalian adalah dalam rangka mendapatkan pandangan/ *insight* dari Bapak-Bapak sekalian tentang rencana Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of*

Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and its Related Activities).

Sebelum kita mulai, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan daftar absen sudah hadir para Anggota mewakili 6 Fraksi dari 10 Fraksi yang ada, berarti secara Fraksi sudah kuorum, berarti RDPU ini bisa kita laksanakan.

Sesuai dengan Tjuga Pasal 251, saya ingin mendapatkan persetujuan, baik dari Narasumber maupun antara Anggota yang terhormat, apakah RDPU ini akan kita laksanakan terbuka atau tertutup? Baik, terbuka.

Dengan demikian, RDPU dengan para Pakar dan para Akademisi ini kita akan segera laksanakan dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 10.45 WIB)

Kita sepakati juga bahwa RDPU ini kita selesaikan atau kita laksanakan sampai pada pukul 13.00. Apabila nanti ada pembahasan lebih lanjut yang membutuhkan jawaban-jawaban atau pendalaman dari para Narasumber, maka kita akan perpanjang setiap 30 menit, sepakat Pak ya?

(RAPAT: SETUJU)

**Para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,
Para Narasumber yang sangat kami muliakan.**

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa inter relasi antara 10 Negara ASEAN itu semakin lama semakin tinggi. Inter relasi ini kemudian dipertajam lagi menjadi saling ketergantungan atau interdependensi dari Negara-Negara ASEAN dalam berbagai hal, baik dalam konteks sosial, politik, budaya, apalagi ekonomi.

Nah, terkait dengan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Vietnam, semakin lama semakin baik, sejak hubungan diplomatik kedua negara dibuka pertama kali pada tahun 1955. Walaupun *platform* politik dua negara antara Indonesia dengan Vietnam itu berbeda, tetapi kita mempunyai beberapa kesamaan. Kesamaan yang paling menonjol itu adalah dari sisi budaya dan semangat persaudaraan antara Anggota ASEAN atau bangsa Asia Tenggara.

Nah namun demikian, karena yang akan kita bahas ini adalah rencana kerja sama dalam bidang saling pengertian, yaitu peningkatan kerja sama antara pejabat Pertahanan dan kegiatan bidang pertahanan, maka Komisi I DPR RI, sebelum kami memberikan rekomendasi kepada Pemerintah apakah MoU ini perlu diratifikasi atau tidak, maka kami perlu mendapatkan pandangan-pandangan dari Bapak-Bapak yang sangat kami hormati.

Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita berikan kesempatan pertama-tama kepada Bapak Kolonel Infantri Dr. Rodon Pedrason untuk dapat memberikan paparannya.

Silakan Pak.

PAKAR (KOLONEL INF. Dr. Rer. Pol. RODON PEDRASON, M.A.):

**Pimpinan yang terhormat,
Anggota Dewan yang terhormat,**

Peserta Sidang yang saya banggakan dan saya hormati.

Kebetulan nama saya salah Pak, yang betul nama saya yang tertera di sini, tetapi tidak apa-apa, kebetulan pada saat diberikan undangan saya juga diminta kesediaan apakah mau dan bersedia menyampaikan pandangan terhadap kerja sama Indonesia-Vietnam ini? Saya bilang ini suatu kehormatan bagi saya dan saya mencoba mencari seperti apa bentuk kerja sama yang sudah berkembang di ASEAN selama ini, khususnya antara Indonesia dengan Vietnam.

Saya memberi judul Indonesia *and* Vietnam. Seperti yang disampaikan oleh Pimpinan tadi, bahwa kawasan Asia Tenggara ini merupakan kawasan yang sangat *diverse*, sangat beragam, baik negara-negara yang menjadi Anggotanya dengan berbagai potensi yang mereka miliki. Mereka meskipun demikian, memiliki kesamaan entah itu di bidang budaya, kemudian ada juga di bidang-bidang *platform* tertentu.

Hubungan diplomasi pertama kali dibuka memang sekitar 30 Desember 1965 antara Presiden Ho Chi Minh dengan Presiden Soekarno pada saat itu dan setiap tahun hubungan Indonesia-Vietnam semakin membaik, terutama di antaranya tidak ada masalah-masalah *crucial* antara Indonesia dengan Vietnam. Berbeda dengan hubungan Indonesia dengan negara tertentu, seperti Indonesia dengan Malaysia atau negara lainnya yang terkadang bicarannya katakanlah “A” di depan, tetapi di belakang mereka melakukan atau membuat rencana lain dengan negara tertentu yang kebetulan merupakan eksternal *power* yang bermain di kawasan kita.

Dari bahan yang kita dapatkan, memang ada disampaikan mengenai masalah pertahanan, bicara tentang masalah kultur, tetapi saya melihat dalam rangka kerja strategis, bahwa hal ini mencerminkan tekad Indonesia untuk membangun hubungan bilateral yang kuat di segala bidang. Nah, ini tidak terlepas sebetulnya dari peran Indonesia yang selalu menjadi pioner atau katakanlah menjadi pelopor dalam berbagai kegiatan di ASEAN.

Dari beberapa penelitian yang kita lakukan, semua kegiatan di lingkup ASEAN itu selalu Indonesia menjadi pelopor. Ironisnya begitu persoalan selesai, katakanlah suatu persoalan *settle*, Indonesia lupa memanfaatkannya, lebih negara lain yang memanfaatkannya, China, entah itu di kawasan ASEAN sendiri, seperti Singapura, Malaysia, kita lupa.

Lalu saya melihat bahwa kawasan kita ini tantangannya, kalau dahulu disebutkan adalah tantangan militer dan nirmiliter. Namun belakangan ini berkembang konsep, bahwa tantangan itu berupa tantangan tradisional dan non tradisional yang memerlukan juga peran bidang pertahanan semakin meluas, bahwa tantangan non tradisional tersebut tidak bisa ditangani oleh sebuah negara, tetapi memerlukan kerja sama regional yang akhirnya menyebabkan berkembangnya konsep regionalisme di ASEAN itu sendiri.

Nah, tantangan-tantangan tersebut, baik itu tantangan internal ASEAN, maupun juga tantangan yang berasal dari eksternal *power*. Keberadaan China, Amerika, maupun negara besar lainnya itu memberikan tantangan tersendiri buat kawasan ini. Baik bila kita mengkaji dari sisi pertahanan maupun mengkaji dari sisi politik tentunya.

Nah, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, karena solusi secara nasional kurang memadai, maka diperlukan kerja sama regional. Ini erat kaitannya tentu dengan rencana Pengesahan Undang-Undang, Rencana Undang-Undang Kerja sama Indonesia dan Vietnam ini.

Dari prespektif hubungan internasional, saya melihat perlu adanya, seperti melihat mitra strategis antara Indonesia dengan Vietnam, bahwa setiap negara di sini memiliki potensi masing-masing yang perlu dieksplor lebih jauh, bahwa Vietnam memiliki potensi sumber daya apalagi

negara kita Indonesia. Terus yang harusnya tidak kita lupakan adalah reputasi negara, bahwa reputasi negara kita sebagai negara besar di ASEAN, sebagai pelopor dari berbagai kegiatan tentunya membawa berbagai keuntungan bagi mitra kita. Sejatinya bahwa kerja sama ini tidak hanya memikirkan dampaknya antara hubungan dua negara, tetapi kita juga tidak lupa memikirkan tentang nasional kita, *national interest* kita, perlu kita lihat manfaatnya di dalam hubungan ini. Bagi kita bahwa kerja sama ini bisa dianggap sebagai sebuah investasi, karena bagaimanapun setiap negara memiliki potensi yang terkadang ada kita miliki dan terkadang ada juga tidak kita miliki, sehingga perlu ditutupi dengan bentuk kerja sama ini.

Kemudian saya melihat tentang MoU Indonesia dan Vietnam atau yang berusaha menjadi Rancangan Undang-undang ya, apakah ada timbul beberapa pertanyaan di sini, bahwa kita perlu mengkaji tentang *urgency* ke material RI dan Vietnam. Saya memberikan prespektif awal tadi tentang beberapa *crucial*-nya, betapa pentingnya hubungan Indonesia dengan Vietnam ini. Kemudian kerja sama ini perlu mengkaji kepentingan kita bersama, khususnya kepentingan nasional dan dikaitkan dengan eksternal *power* di kawasan kita. Isu-isu Laut China Selatan, berbagai presepektif ancaman yang ada di kawasan kita, ini menjadi satu pertimbangan menurut saya di dalam meratifikasi Rancangan Undang-undang ini.

Prospek bagi arah kerja sama RI dan Vietnam di masa mendatang juga perlu kita pertimbangkan. Apakah hanya perlu di bidang pertahanan saja ataukah bidang kerja sama strategis lainnya, apakah itu hutang budaya, entahkah itu barangkali khusus atau spesifik *moving people* di dalam artian orang per orang kemudian dewa, katakanlah juga perilaku-perilaku pertahanan yang saling bertukar atau *exchange* di sini. Dan menurut saya yang paling penting lagi adalah bahwa apakah implikasi kemitraan RI dan Vietnam ini, ini juga berpengaruh terhadap stabilitas kawasan kita? Karena kalau kita hanya berbicara mengenai MoU, mestinya itu merupakan bilateral antara Indonesia dengan Vietnam, tetapi kalau kita bicara tentang masalah Undang-Undang, tentunya ini menyangkut masalah legalitas secara internasional. Saya tidak mengerti hukum sebetulnya, tetapi yang jelas bicara tentang Undang-Undang dan perlu diratifikasi, implikasinya jelas bicara internasional, beda dengan MoU antara negara kita dengan Vietnam, tetapi menurut saya dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh negara kita maupun yang dimiliki oleh Vietnam, termasuk tentang potensi regional dan posisi negara kita maupun Vietnam sendiri yang memiliki peran penting di Asia dan di ASEAN. Menurut saya kita ratifikasi saja, sehingga ada payung hukum dalam kerja sama kita ini. Karena memang nantinya menurut saya ratifikasi ini cenderung katakanlah hubungan Indonesia-Vietnam ini seperti membentuk sebuah pakta pertahanan. Secara Pakta sih sebetulnya, secara realita Pakta itu ada menurut saya. Kerja sama pertahanan yang dibangun oleh Indonesia dengan negara ASEAN lainnya atau negara ASEAN tertentu dengan negara ASEAN lainnya, itu mengandung unsur-unsur, elemen-elemen Pakta Pertahanan itu sendiri, tetapi memang di dalam Rancangan Undang-undang ada yang perlu kita ungkapkan, ada yang tidak. Termasuk juga apabila terjadi sebuah Pakta Pertahanan atau *defence community* ini, perlukah kita sebutkan secara resmi atau tidak? Karena kalau kita nyatakan itu sebuah resmi, tentu ada juga konsekuensi-konsekuensi yang harus kita ikuti atau kita pakai. Namun menurut saya, kita tidak bisa menghindari dari kenyataan bahwa kerja sama kita tersebut mengandung elemen-elemen atau Pakta Pertahanan tersebut. Tinggal kita mensiasati seperti apa memang Pakta atau bentuk kerja sama bidang pertahanan yang tidak membawa kita menjadi sebuah Pakta Pertahanan di Asia. Bisa jadi bahwa kerja sama Indonesia-Vietnam ini nanti menjadi sebuah *role model* bagi kerja sama Negara-negara ASEAN lainnya.

Entahkah itu antara negara kita dan negara lain atau barangkali Negara-negara Anggota ASEAN satu dengan lainnya.

Saya kira itu pendapat awal saya di dalam Rapat ini, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan terima kasih Pimpinan atas waktu yang diberikan kepada saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak untuk penjelasannya.

Mohon maaf untuk kesalahan nama yang sudah kami kirimkan.

Ada 3 hal menarik yang perlu kami garisbawahi, yang mudah-mudahan bisa dieksplorasi lagi. Pertama itu adalah bahwa Bapak melihat, bahwa hubungan bilateral Indonesia dengan Vietnam itu lebih jujural ya bila dibandingkan hubungan kita dengan misalnya dengan Malaysia, dengan Singapura begitu ya. Jadi lain yang disampaikan, lain pula yang diperbuat begitu. Jadi ini bisa menjadikan pijakan kita untuk ke proses lebih maju, apakah MoU ini perlu kita ratifikasi atau tidak.

Kemudian kami juga sepakat, bahwa kita itu selalu gagal dalam melakukan *follow up* terhadap apa yang sudah kita tanam. Istilahnya itu kita punya banyak sekali *political devidence*, tetapi kita tidak bisa realisasikan menjadi suatu yang komprehensif untuk ekonomi. Nah, ini nanti Bapak kesannya agak nakut-bakutin juga ini perlu dikaji lagi, apakah kita perlu lanjut atau tidak? Karena ada potensi berbahayanya jika dikaitkan dengan konflik di Laut China Selatan, dimana Vietnam adalah salah satu dari *claimant state*. Apakah kita masuk ke sana, berarti kita akan juga masuk dalam kubangan tersebut, nanti kita eksplorasi Pak ya, terima kasih.

Berikut kita berikan kesempatan yang sama kepada Dr. Kusnanto Anggoro.

PAKAR (Dr. KUSNANTO ANGGORO):

Terima kasih.

Selamat pagi,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat.

Seperti yang dahulu-dahulu, saya merasa terhormat bisa hadir di forum ini dan mudah-mudahan apa yang saya paparkan bermanfaat untuk ditelusuri lebih lanjut dan terima kasih juga diberikan kesempatan yang kedua. Karena setelah rekan saya Kolonel Dr. Rodon Pedrason jadi saya bisa lebih memusatkan perhatian kepada beberapa hal yang relatif lebih praktikal dalam kontek hubungan Indonesia dengan Vietnam.

Ini hanya akan menyampaikan beberapa catatan saya saja. Pertama, saya kira kita harus menganggap ini sebagai sebuah momentum demokrasi yang luar biasa dalam konteks hubungan antara eksekutif dan legislatif di Indonesia. Karena *Memorandum of Understanding* dalam kerja sama antara Indonesia dengan Vietnam ini sebenarnya kan sesuatu yang sudah lama dan kalau dari sisi substansi barangkali seharusnya tidak memerlukan ratifikasi melalui pengukuhan dalam bentuk Undang-Undang dari DPR. Karena apa yang dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 24 tentang Perjanjian Internasional, sesungguhnya apa yang terkait

misalnya adalah pertahanan dan keamanan negara, politik, perdamaian, perang, hak asasi manusia, konvensi internasional dan seterusnya jauh lebih dalam sifatnya dibandingkan *Memorandum of Understanding* antara Indonesia dengan Vietnam. Jadi ini sebenarnya merupakan sesuatu yang saya kira juga bisa dilihat dalam konteks betapa menguntungkannya kita memasuki tahap demokratisasi, sehingga proses *check and balances* antara Pemerintah dan DPR dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan itu masuk sampai sesuatu yang sifatnya agak teknikal. Seperti kita tahu, bahwa *Memorandum of Understanding* ini kan sesungguhnya sudah ditandatangani pada tahun 2010 dan sejak tahun 2010 hubungan antara Indonesia dan Vietnam juga sudah berlangsung. Kita bersama dengan Vietnam ada di dalam berbagai forum, termasuk di antaranya adalah di dalam ASEAN, tetapi juga ada di dalam *ASEAN Defence Ministry Meeting* dan tahun-tahun lalu banyak sekali *military relation* antara Indonesia dengan Vietnam itu terjadi. Jadi selama 5 tahun terakhir, mulai tahun 2010 sebenarnya banyak terjadi hubungan itu. Jadi ini kemudian kalau mau dikukuhkan menjadi sebuah Undang-Undang, saya kira itu merupakan sekali lagi sebuah proses pematangan demokrasi dan seterusnya di Indonesia. Nah, tentu saja itu bermanfaat dalam konteks demokratisasi di Indonesia sendiri. Mari kita lihat nanti substansinya bagaimana.

Nah, ini sekedar gambaran saja, bahwa di dalam 8 tahun terakhir, sesungguhnya hubungan Indonesia dan Vietnam terutama dalam konteks diplomasi pertahanan itu ya tidak terlalu tinggi kalau dibandingkan dengan hubungan diplomasi pertahanan antara Indonesia dengan negara-negara lain. Kita dalam 5 atau 6 tahun terakhir sebenarnya memiliki beberapa kontak, hubungan, *visit*, lalu kemudian tukar menukar perwira dan sebagainya dengan berbagai Negara ASEAN, tetapi data yang saya dapatkan itu menunjukkan bahwa dengan Vietnam sesungguhnya hanya 5% saja dari keseluruhan diplomasi pertahanan Indonesia terhadap negara-negara ASEAN. Kita punya 10% dengan Philipina, 15% dengan Thailand, 25% dengan Singapura, dan 30% dengan Malaysia. Jadi kalau kita lihat ASEAN itu terdiri dari 10 Anggota misalnya, maka perhatian memang kita pusatkan ke Malaysia dan Singapura dan Thailand, sedangkan Myanmar, Kamboja, dan Laos itu tidak lebih umumnya kurang dari 5%. Nah, kenapa konteks ini perlu saya kemukakan, karena sebenarnya kalau memang kita memang benar-benar ingin katakanlah memegang *leadership* di dalam ASEAN, maka bukan tidak mungkin kalau hubungan antara Indonesia dengan Vietnam itu menjadi pintu masuk. Bukan tidak mungkin kalau kehadiran Indonesia itu bisa mengkoreksi, sehingga lambat laun itu ASEAN bisa menjadi sebuah kesatuan. Sebab kalau kita nilai sekarang, terlepas dari berbagai retorika, maka sesungguhnya ASEAN tetap terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka-mereka yang di *original member*, 5 itu kemudian kelompok lainnya adalah 5 berdatangan sejak tahun 1997 dan pada umumnya memang mereka mempunyai kemampuan ekonomi, kemudian politik dan seterusnya yang kurang lebih tidak sebanding dengan Anggota-anggota di *the original member five*, kira-kira begitu.

Jadi kenapa ini saya tekankan? Nah, pertanyaannya tentu kemudian karena MoU ini yang mau dikukuhkan jadi Rancangan Undang-Undang untuk ratifikasinya itu merupakan sebuah landasan hukum, mungkinkah kita bisa meningkatkan kerja sama pertahanan atau kerja sama militer antara Indonesia dengan Vietnam.

Nah, ini ada 3 kurva. Kurva yang biru itu menunjukkan perkembangan yang terjadi sejak tahun 2003 sampai tahun 2013-2014 mengenai kesepakatan-kesepakatan yang kita punya pada tataran politik diplomatik yang ditandatangani oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri Vietnam, itu kurva yang biru kurang lebih. Bisa kita bayangkan itu

kecondongan bisa menunjukkan berapa laju perubahan kadar diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. Yang kuning itu kurang lebih menunjukkan hubungan-hubungan kerja sama ekonomi meskipun indikatornya terbatas, terbatas kepada nilai transaksi perdagangan kedua pada negara. Yang konon dahulu tahun 2003 mencapai 1,6 billion dollar, sekarang atau tahun lalu itu mencapai sekitar 5, dan nanti diharapkan pada tahun 2018 itu akan mencapai 10 billion dollar. Itu kita bandingkan antara yang biru dan yang kuning, itu laju perubahannya menunjukkan bahwa yang kuning jauh lebih cepat dibanding dengan yang biru. Nah, diplomasi pertahanan sejak tahun 2010 adalah kurva yang hijau, yang kira-kira stagnan saja tahun 2010-2014-2015. Kita tidak tahu apakah nanti akan mengikuti pola titik titik hijau atau bahkan kita bisa membuat diplomasi pertahanan akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan diplomasi ekonomi maupun diplomasi politik atau kemungkinan kita bisa menggunakan diplomasi pertahanan untuk memacu diplomasi di bidang politik maupun diplomasi di bidang ekonomi, tetapi tentu saja ini adalah sifatnya ekspektasi, akan sangat tergantung kepada apa yang akan dibuat di dalam hubungan itu dan bagaimana kemudian itu nanti akan ditopang pada tataran-tataran praktis.

Harapan saya adalah bahwa kita akan meningkat dan katakanlah nanti kalau seandainya diplomasi pertahanan Indonesia dan Vietnam melalui MoU yang akan dikukuhkan menjadi Undang-Undang ini bisa disetujui oleh DPR, maka mudah-mudahan itu bisa berhasil dengan sesuatu yang lebih baik. Saya membayangkan ada banyak soal antara Indonesia dan Vietnam. Yang pertama adalah yang terkait dengan misalnya yang terjadi beberapa masa silam, terkait dengan masalah penangkapan *illegal fishing* dan seterusnya, sesuatu yang akan sangat mungkin terjadi kelak kemudian hari. Bahkan menurut saya bisa dipastikan akan terjadi dengan intensitas yang semakin lama semakin tinggi. Dengan demikian, maka ada sejumlah soal yang harus selalu diselesaikan setiap saat antara Indonesia dan Vietnam. Apakah kerja sama ini sudah membuka ruang untuk itu, jawabannya belum, karena di dalam salah satu pasal yang tertulis di dalam MoU, maka beberapa rincian program itu baru akan dibicarakan pada tingkat Komisi yang nanti direkomendasikan kepada kedua belah pihak negara dan seterusnya dan seterusnya, tetapi bukan tidak mungkin juga kalau di antara beberapa hal yang diusulkan dalam MoU, misalnya adanya intelijen *sharing*, terus ada latihan bersama, lalu kemudian adalah dialog dan beberapa yang lain bisa membuka ruang untuk membicarakan banyak hal antara Indonesia dan Vietnam, termasuk diantaranya adalah menyelesaikan persoalan-persoalan sengketa bilateral terkait, misalnya adalah penangkapan nelayan atau *illegal fishing*, ini bisa saja dibicarakan. Mungkin bentuknya akan menjadi semacam *hotline of communication* antara Jakarta dan Hanoi. Barangkali itu akan membuka ruang, bahwa sekurang-kurangnya kalau ada nelayan yang ditangkap di perairan Indonesia atau nelayan Indonesia yang ditangkap di perairan Vietnam, bahkan disepakati sekurang-kurangnya 2x24 jam harus ada dan seterusnya dan seterusnya. Tataran itu bukan tidak mungkin bisa dilakukan kalau seandainya kita mengembangkan hubungan diplomasi pertahanan ini secara formal.

Persoalan yang kedua adalah yang terkait dengan Laut China Selatan. Banyak yang mengatakan, saya kira termasuk Kementerian Luar Negeri, bahwa kita tidak punya perbatasan kita dengan Vietnam sudah selesai. Setahu saya perbatasan yang selesai adalah perbatasan dalam konteks landas kontinen, itu selesai tahun 2003 seingat saya, tetapi sebenarnya kedua belah pihak belum menyepakati tentang Zona Ekonomi Eksklusif, dan Indonesia sebenarnya dalam konteks Zona Ekonomi Eksklusif di sekitar Natuna itu sudah secara sepihak tidak ada garis yang paling di atas kurang lebih yang berjarak kurang lebih 436 kilometer dari Saigon kurang lebih separuh jarak antara Saigon sampai ke Natuna dan dia menjadi wilayah Indonesia.

Bisa dipastikan kalau itu terjadi akan ada *overlapping claim* dengan Vietnam, khususnya adalah dalam konteks ekonomi eksklusif. Nah, kalau itu terjadi, saya kira lebih baik ada forum yang formal daripada yang tidak. Sebab ketika ada yang formal, paling tidak kita bisa membicarakan melalui sebuah forum secara dan seterusnya dan seterusnya, tetapi sekali lagi yang ingin saya katakan adalah bukan tidak mungkin bahwa persoalan dua itu, satu yang terkait dengan *illegal fishing*, dua adalah yang terkait adalah dengan misalnya kemungkinan konflik ekonomi eksklusif zona dan ketiga saya kira kalau kita mau juga terkait dengan *marine biodiversity* di masa depan. Ini akan menjadi isu-isu sentral. Sayang sekali hal itu tidak tersirat di dalam *Memorandum Understanding*, tetapi saya kira termasuk dalam *point "f"* atau apa dan lain-lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi bukan tidak mungkin untuk bisa dikembangkan ke arah itu.

Nah, ini beberapa keunggulan Vietnam dari segi militer. Sayang sekali gambarnya terlalu kecil, tetapi nanti saya kira karena ada *soft file*, maka Sekretariat DPR bisa untuk memperbesar beberapa gambar itu. Akan kelihatan misalnya keunggulan Vietnam dibandingkan Indonesia di bidang Angkatan Laut, misalnya Vietnam mempunyai keunggulan, satu diantaranya adalah pada *marine warfare*, jadi perang kapal selam dan yang kedua adalah komando pertahanan laut, itu keunggulan yang dimiliki oleh Vietnam dibanding yang dimiliki oleh Indonesia. Lalu ada juga keunggulan yang dimiliki oleh Angkatan Udara Vietnam, terutama yang terkait dengan *network centric warfare*. Saya kira ini merupakan suatu hal yang penting keunggulan Vietnam dan saya kira kita bisa belajar dari Vietnam. Kemungkinan besar tentang *network centric warfare* itu terutama akan sangat berpengaruh kepada kekuatan udara dan dalam beberapa hal saya kira juga kekuatan Angkatan Darat Indonesia, tetapi intinya adalah ada banyak hal dimana sebenarnya Vietnam itu mempunyai keunggulan atas Indonesia, sehingga kita bisa memanfaatkan itu dalam sebuah kerangka diplomasi. Maka bukan tidak mungkin kalau kita bisa belajar sesuatu, di lain pihak ada beberapa keunggulan kita di bidang Angkatan Laut, misalnya kita mempunyai keunggulan yang terkait dengan perang amfibi. Di bidang Angkatan Udara kita mempunyai beberapa keunggulan juga dibandingkan Vietnam, tetapi *gain and take* diantara kedua negara saya kira sangat mungkin dan itu merupakan suatu dasar penting saya kira dalam hubungan antara 2 negara.

Point kedua yang saya kira juga perlu dibicarakan adalah dalam *maintenance* senjata. Kita tahu, kita punya beberapa senjata asal dari Rusia, Uni Sovyet, misalnya Sukhoi, beberapa di antaranya dari Eropa Timur. Lalu Vietnam seperti halnya India sebenarnya merupakan teman Sovyet dan teman Rusia yang baik di masa lalu, sehingga beberapa fasilitas mengenai bagaimana untuk *me-maintenance* Sukhoi 27, Sukhoi 36, dan sebagainya itu ada di Vietnam. Nah, walaupun itu nanti akan tidak sampai pada persoalan-persoalan terkait dengan reparasi atau *sparepart*, maka sekurang-kurangnya *training* yang diberikan kepada pilot Indonesia bisa dilakukan di Vietnam, di samping tentu bisa didatangkan di India, tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa hubungan baik antara Vietnam dengan Rusia. Rusia sebagai pemasok teknologi dan persenjataan Vietnam bukan tidak mungkin juga bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Saya kira ini juga yang pernah dibicarakan beberapa tahun silam, ketika kita hendak membeli Sukhoi yang beberapa minggu yang lalu diputuskan akan dibeli di Indonesia, tetapi intinya lagi-lagi adalah bahwa di dalam konteks pertahanan atau sistem persenjataan masa depan kita, Vietnam bisa jadi menjadi salah satu teman yang bermanfaat, sehingga kita tidak perlu langsung deal dengan Rusia, khususnya terkait dengan *training* dan *maintenance* beberapa senjata yang kita miliki yang berasal dari Rusia.

Terakhir saya kira penting untuk disebut juga tentang bagaimana *maritime patrol*, ini saya kira Vietnam mempunyai suatu keunggulan saya kira dibandingkan dengan Indonesia, Vietnam jauh lebih unggul. Di Indonesia kita masih sibuk tentang Badan Keamanan Laut. Ada juga yang masih berpikir untuk membuat gugatan terhadap ini itu dan seterusnya. Vietnam sudah cukup kokoh mempunyai *maritime patrol* yang saya kira luar biasa kuat dan di samping itu tentu nanti akan terkait dengan *maritime* ekonomi. Karena Vietnam sampai tahun 2020 itu sudah mematok, bahwa ekonomi maritim Vietnam itu akan menyumbang sampai 55% *gross domestic product*. Sesuatu yang tidak pernah muncul dalam poros maritim Indonesia. Jadi lagi-lagi dalam konteks itu barangkali kita bisa paling tidak membicarakan banyak hal dengan Vietnam.

Ini sekedar catatan akhir saja, jadi tentu nanti ada beberapa soal yang barangkali langsung maupun tidak langsung itu akan menjadikan Indonesia dalam posisi yang agak rumit kalau kita tidak secara *skil full* memainkan peran diplomasi, misalnya adalah terkait dengan Laut China Selatan, karena dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan antara Vietnam dengan China itu menjadi semakin tajam. Vietnam mulai mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat dan sebagainya. Posisi Vietnam menyerupai posisi Philipina. Jadi bisa dibayangkan bahwa Vietnam dan Philipina adalah mereka-mereka yang berada di ekstrim kanan, di garis yang sangat konfrontasional terhadap China, tetapi kita juga tahu bahwa di dalam negara-negara ASEAN, misalnya adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, saya kira berada di ujung yang paling kiri, agak akomodatif terhadap tuntutan-tuntutan China dan sesungguhnya bisa ditambah beberapa Negara ASEAN lain, dan saya kira beberapa Negara ASEAN lainnya itu adalah Brunei Darussalam dan sebenarnya juga Malaysia. Itu sebabnya kenapa dalam *Summit* awal November kemarin di Malaysia bahwa ke Pimpinan Malaysia, Malaysia tidak berhasil meng-*goal*-kan sebuah Deklarasi yang menyangkut tentang Laut China Selatan. Nah, kalau gambaran itu dibayangkan dalam konteks 10 Anggota ASEAN, maka Indonesia dan Vietnam bukan mustahil bisa menjadi semacam poros baru, sekurang-kurangnya dalam kasus Laut China Selatan untuk menjaga keseimbangan antara yang tidak terlalu keberatan atau pro dengan China dengan di lain pihak yang terlalu konfrontasional dengan China atau dengan Tiongkok. Jadi posisi itu saya kira menjadi posisi yang penting dan ini menyambung kembali sejarah yang kita miliki sejak tahun 1945 pertemanan antara Soekarno dan Hanoi, kesesuaian strategi gerilya antara Fungyian Giap dengan Jenderal Sudirman, kepemimpinan Indonesia dan Hanoi di dalam Asia Afrika dan sebagainya.

Jadi menurut saya kalau kita bisa secara baik memainkan peran dalam diplomasi itu, Vietnam adalah sebuah teman yang berharga, tetapi memang ada beberapa hal yang mungkin belum dibicarakan lebih lanjut, misalnya adalah di dalam MoU yang sebenarnya kita tidak berbicara terlalu banyak, kecuali menyepakati tentang beberapa *item* yang akan masuk dalam kerangka kerja sama, misalnya konsultasi tentang masalah strategis, yang kedua adalah kunjungan di antara pejabat, ketiga adalah latihan Angkatan Bersenjata, empat, lima, enam, tujuh, dan seterusnya dan dikunci dengan paling akhir "f". Seingat saya ada beberapa hal yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nanti kelak di kemudian hari saya kira kita bisa diskusikan lagi. Tentu antara Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, karena detail dari beberapa program itu, seperti tertulis dalam MoU baru akan ditetapkan kemudian sesuai dengan kesepakatan bersama.

Jadi atas dasar itu saya kira lagi rekomendasi saya adalah *monggo kerso*. Silakan kalau mau diangkat menjadi Rancangan Undang-Undang untuk ratifikasinya dengan dua alasan. Satu adalah karena itu bagian dari proses demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, dalam konteks

hubungan antara legislatif dan eksekutif. Kedua, adalah bahwa isi dari MoU ini saya kira positif membuka ruang kerja sama, bahkan kalau kita berpikir dalam konteks *world case scenario* itupun tidak tampak beberapa hal yang kira-kira akan membawa implikasi yang negatif. Dan yang ketiga adalah tentu bahwa kalau itu bisa dilaksanakan, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali mendapatkan kepemimpinan di ASEAN, terutama dalam konteks untuk menjaga keseimbangan antara politik di *mainland* South East Asian dengan the *Archipelagic* South East Asian, Indonesia dan Vietnam berturut-turut adalah lambang dari sebuah kekuatan di selatan dan kekuatan kontingen di utara. Ini seakan-akan mengingatkan kita semua antara Kerajaan Aman dan Kerajaan-kerajaan Majapahit pada abad ke 12, 13, dan kembali pada abad ke VII kalau itu bisa dilakukan, maka bukan tidak mungkin bahwa pola perimbangan di Asia Tenggara berada di bawah kendali antara Indonesia dan Vietnam, tetapi tentunya ini merupakan ekspektasi. Itu akan sangat tergantung kepada Anggota dewan yang terhormat. Bagaimana untuk senantiasa selalu mengingatkan Pemerintah untuk menanyakan apa yang berada di balik kalkulasi dan perhitungan mereka dan untuk mengevaluasi atau menilai seberapa jauh itu bisa dilihat sebagai sebuah langkah yang berhasil.

Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bahan diskusi lebih lanjut.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dr. Kusnanto Anggoro untuk penjelasannya yang sangat memberikan pengayaan kepada kami, terkait dengan situasi yang terjadi di kawasan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Vietnam.

Mudah-mudahan para Anggota Komisi I DPR RI mencatat semuanya, paling tidak ada 3 alasan yang menggarisbawahi rekomendasi Bapak, bahwa MoU ini bisa dilanjutkan menjadi Rancangan Undang-Undang yang diratifikasi menjadi Undang-Undang.

Berikut kita berikan kesempatan terakhir kepada narasumber kita yang terakhir Bapak Dr. Teuku Rezasyah.

Silakan Pak.

PAKAR (Dr. TEUKU REZASYAH):

Terima kasih Pimpinan Sidang.

Teuku Rezasyah dari Universitas Padjajaran.

Selamat siang Pimpinan Sidang, Bapak/Ibu sekalian.

Salam sejahtera,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Om swastiastu.

Untuk kesekian kalinya saya harus menghargai keikhlasan dan kewibawaan DPR RI ini membuktikan bahwa kita adalah negara yang demokrasi, dimana untuk hal-hal yang strategis dilakukan konsultasi publik. Terima kasih.

Kemudian saya juga berpandangan proses pembuatan Undang-Undang ini secara teori sudah benar, pertama sudah ada naskah akademik, kemudian sudah ada telaah atas MoU tahun

2010, kemudian di *upgrade* MoU tersebut menjadi revisi MoU menjadi Rancangan Undang-Undang. Saya setuju dengan pandangan abang-abang dan adik saya, bahwa kita dengan Vietnam adalah relatif tidak bermasalah, oke.

Izinkan saya memulainya, bisa kembali kepada *slide* yang sebelumnya, saya akan mencoba membahas mengenai pertama tanggapan atas naskah akademik. Selanjutnya tanggapan atas MoU dari Vietnam bidang pertahanan, dari situ masuk kepada tanggapan atas *draft* MoU hasil harmonisasi.

Menurut hemat saya, roh dari pada sebuah Rancangan Undang-Undang itu adalah naskah akademik, dimana di dalam naskah akademik itu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan teoritis, kita mengkaji hubungan kesejarahan, dan kita mengantisipasi bagaimana hubungan-hubungan masa depan. Maka pada bagian perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi di bagian awal, itu hendaknya kita katakan bahwa ada kesamaan antara aspirasi teknologi Indonesia, aspirasi strategis Indonesia dengan Vietnam. Jadi maksudnya agar naskah akademik ini dibuat lebih *scientific*. Jadi mohon dimasukkan kata-kata kunci, misalnya *revolution in military affairs*, kemudian adanya dual teknologi, kemudian *military operation under network*. Kita sangat terbiasa melakukan hal ini dengan Vietnam. Kita mengenal konsep-konsep ini, Vietnam juga mengenal konsep-konsep ini. Jadi seperti Pak Kusnanto tadi katakan ada faktor sejarah, ada faktor sejarah masa lalu, ada faktor sejarah masa sekarang, kemudian ada faktor kecenderungan masa depan.

Kemudian untuk bagian metode penyusunan naskah akademik di bagian D di halaman 2, akan lebih baik kalau naskah akademik ini dibuat dengan cara yang tidak standar mungkin, dimana kita juga melakukan eksplorasi dari dokumen-dokumen yang masa lalu antara hubungan kita dengan Vietnam untuk menunjukkan, bahwa sebenarnya yang kita lakukan ini adalah gongnya, tetapi dari dahulu sudah ada suatu rangkaian kerja sama yang terus menerus dan untuk itu mohon kita gunakan kata-kata kunci misalnya di tiap pertemuan pemimpin selalu mengatakan, baik kita maju lagi, kita pertemuan selanjutnya, dan kita perbanyak kerja sama di bidang hal-hal tertentu. Kemudian kita juga bisa katakan dari faktor sejarah peran kita besar Pak tahun 1970-an itu kita mengirim kontingen namanya ICCS (*International Commission for Controller of Visions*). Dan peranan Indonesia itu sangat dihargai oleh Vietnam, itu adalah awal dimana kita menanam budi dengan masyarakat Vietnam.

Kemudian untuk kehandalan sebuah TOR, ada baiknya juga dikemukakan, bahwa TOR ini sudah dibuat berdasarkan konsultasi dengan kementerian teknis, sehingga tidak terkesan bahwa ini pertahanan saja, tidak tetapi pertahanan yang punya *related implication* dengan Kementerian-kementerian teknis yang lain. Karena bagaimanapun, sebuah naskah akademik itu harus dibuat dengan kombinasi *top down* dan *bottom up* Pak. Jadi *top down* okelah Kemhan paling tahu, tetapi *what next* tentunya akan banyak Kementerian Teknis yang akan terlibat, DPR RI nanti dikonsultasikan, Kementerian Koordinator Politik Keamanan sudah disebutkan di situ, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Kemenlu, yang terakhir Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah banyak kasus, kemudian Perguruan Tinggi, Lembaga Riset dan Industri Strategis. Jadi jangan sampai terjadi hasil-hasil, tetapi mereka tidak sempat memberikan *foot note*, apa harapan-harapan tertulis mereka beri, sebuah kerja sama pertahanan. Jadi menurut hemat saya, ada baiknya naskah akademik ini dibuat lebih spesifik.

Sebuah naskah akademik tentunya berakar bukan hanya kepada pemikiran-pemikiran modern, tetapi berakar juga kepada pemikiran-pemikiran asli kedua negara Pak. Jadi mohon dalam naskah akademik ini dikemukakan pandangan-pandangan modern, oke Handrik Kasinger,

oke Claus Smith, tetapi Vietnam punya Ho Chi Minh, Vietnam punya Van Van Dong, kita punya Sudirman, kita punya Nasution. Jadi agar kerja sama ini berlanjut, kita tidak hanya berbicara tentang kerja sama teknologi, tetapi juga berbicara tentang dampaknya di sektor pertahanan darat misalnya.

Kemudian sebuah naskah akademik hendaknya dibuat juga dengan mengkritisi dokumen-dokumen pertahanan yang sejenis yang dibuat di kawasan Asia dan Pasifik. Jadi intinya ini kita mendapatkan *claim* akademik, bahwa betul RI dan Vietnam itu penting, betul RI dan Vietnam itu strategis kata pihak asing, tetapi kedua itu juga berkontribusi bagi stabilitas di kawasan. Nah, ini merupakan logik bahwa kita oh ya secara sejarah kita dekat, kemudian secara pemikiran strategis kita juga dekat dan juga pihak lain juga bilang dekat jadi gongnya sekarang saja.

Oke, kritik saya yang saya pikir sebagai Warga Negara Indonesia, saya agak tersinggung Pak. Dalam tanggapan atas naskah akademik, di bagian B, di dalam landasan sosiologis halaman 11, ada penggunaan kata yang menurut hemat saya menyinggung nasionalisme saya Pak, yang mempunyai kemampuan pertahanan yang lebih maju. Apa betul Vietnam memiliki kemampuan pertahanan yang lebih maju daripada kita? Saya tidak yakin, kita *compitable* Pak, biasa dalam klausul awal kita mengatakan saling menghargai, saling *take and give*. Jadi menurut hemat saya penggunaan 7 kata tersebut secara tersamar menunjukkan sikap rendah diri kita terhadap Vietnam. Mohon kita revisi, kita ralat, itu yang pertama naskah akademik. Padahal TNI banyak memiliki keunggulan yang tidak perlu diragukan lagi. Jadi mohon naskah akademik kita edit Pak, sehingga mental kita ini setara dengan mereka. Saya kritik “yang mempunyai kemampuan pertahanan yang lebih maju”, belum tentu. Kemudian sarannya, kita menggunakan kalimat yang lebih netral misalnya, Pemerintah Republik Indonesia perlu mengadakan hubungan kerja sama dengan Vietnam karena memiliki kedekatan dalam tradisi pertahanan, serta mengingat sudah terjalinnya kerja sama pertahanan secara saling menguntungkan. Jadi mohon naskah akademik diedit.

Selanjutnya ini naskah Memorandum Saling Pengertian yang *diteken* tahun 2010, maaf, saya katakan saya harus membuka sejarah ini. Kita selama ini tidak sempat merevisi, tetapi sudah *diteken* oleh Menhan kita pada waktu itu Pak, selama 5 tahun saya juga kaget semalem, pada halaman 1 pada bagian mengingat nama Vietnam kita tulis dengan r kecil seharusnya republik, mohon Pak ini kita Asia, jangan salah kita memanggil negara lain, ini bisa dianggap *insulting* Pak. Ini sudah *diteken* oleh Pak Purnomo Sugiantoro. Kemudian pada halaman 4, Pasal 6 ayat (4), tanpa sengaja telah tertulis kata Papua New Guinea, aduh Pak, saya khawatir dianggap MoU ini katetris. Kondisi ini berpotensi batalnya MoU ini demi hukum Pak, karena dalam teks Bahasa Inggris kata Papua New Guinea tidak ada. Ini mohon kita peringatkan kepada Komisi I DPR RI agar kita hati-hati, jangan sampai masuk klausul-klausul gelap Pak. Mungkin *copy and paste*, tidak sengaja. Mohon ke depannya Pemerintah RI lebih berhati-hati, sehingga tidak mengurangi *copy and paste* di kemudian hari.

Semoga pertemuan ini menjadi momentum kita pelajari kontrak-kontrak kita dari negara lain. Jangan sampai ada ayat-ayat sisipan Pak, ini bahaya sekali. Dalam teks Vietnam tidak ada kata “Papua New Guinea”, dalam teks Inggris tidak ada kata “Papua New Guinea”, kenapa dalam teks RI ada kata “Papua New Guinea” di situ di ayat (4)? Dan Menhan sudah *teken* Pak. Apakah kita tidak melakukan ralat? Mohon kita lakukan itu. Kemudian dalam Pasal 7 halaman 4, dalam edisi Bahasa Indonesia terdapat kata “disetujui oleh Ketua Komite Bersama”, saya *cross check* dengan dokumen asli dalam Bahasa Inggris di halaman 17, kata yang digunakan adalah *both*

chairs of joint committee. Jadi harus disetujui oleh kedua belah pihak, oleh pimpinan kedua pihak tersebut, sehingga jalan keluarnya adalah dapat disarankan untuk merubah kata pada teks ini menjadi “disetujui oleh kedua ketua pada komite bersama” Pak.

Jadi daripada kita punya masalah di kemudian hari, mohon MoU-nya kita revisi, bagaimana caranya ya Bapak-Bapak lebih tahu dari saya.

Lanjut kepada *slide* berikutnya, saya melihat adanya konsistensi antara *draft* Rancangan Undang-undang RI-Vietnam dengan hasil harmonisasi, itu ada sama, 1,2,3,4,5,6,7 sama. Jadi dapat dikatakan Nasmik MoU dari perkembangan terakhir itu garis merah berarti oke.

Masuk kita kepada *slide* yang terakhir, melihat tingkat perjanjian yang dibuat dokumen ini berpotensi menjadi sebuah kuasi aliansi antara kekuatan terbesar dalam ASEAN. Nomer dua, namun prinsip kehati-hatian harus diutamakan mengingat Vietnam adalah pembelajar yang sangat cepat. Pasca perang Vietnam mereka belajar teknologi kopi dari kita dengan tingkat pemahaman 0, sekarang mereka telah menjadi kompetitor kita yang terhebat dalam dunia perkopian, ini hati-hati sekali nanti dalam alih teknologi. Kemudian semoga kekerabatan yang baru ini dapat memperkuat kemampuan kita dalam mengoptimalkan isu-isu, seperti kekuatan *sea line of communication* dan pementapan ide dari *maritime full goal* kita.

Ibu Bapak sekalian, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Teuku Rezasyah mengenai paparannya yang menyoroti mengenai Naskah Akademik yang merupakan sebuah roh dari sebuah Rancangan Undang-Undang. Kami sendiri Pak memang menemukan beberapa catatan, tetapi yang Bapak temukan itu jauh lebih banyak daripada yang kami temukan dan tentu saja ini akan menjadi bahan ketika kami nanti melakukan pembahasan mengenai Naskah Akademik dari Rancangan Undang-Undang ini ketika kami membicarakan ini dengan Pemerintah pada waktunya nanti.

Kami sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Bapak, bahwa hakekat dari kerja sama itu sejatinya ada 3, pertama adalah kesetaraan, kedua adalah saling menghormati, dan ketiga adalah saling menguntungkan. Jadi ketiga hal ini harus didapatkan ketika kita akan menjalin kerja sama dengan satu negara yang bersifat bilateral.

Bapak-bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,

Tiga Narasumber kita sudah memaparkan pandangan masing-masing mengenai perlu atau tidaknya kita meratifikasi MoU Rencana Kerja Sama Indonesia dengan Vietnam untuk Kerja Sama Pejabat Pertahanan dan juga Aktifitas di Bidang Pertahanan. Kalau kita baca, maka kerja sama ini akan sangat komprehensif, karena memayungi individu, yaitu para pejabat di bidang pertahanan dan juga aktifitas-aktifitas terkait bidang pertahanan itu sendiri.

Kita berikan kesempatan kepada para Anggota yang terhormat untuk melakukan pendalaman. Kita akan selesaikan sebagaimana komitmen kita di awal tadi, mudah-mudahan bisa selesai pada pukul 13.00, jika tidak, kita akan perpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Ada yang ingin melakukan pendalaman? Pak Salim Mengga dari Partai Demokrat, Pak Budi Youyastri dari Fraksi PAN. Oke, kita mengalir saja ada dua pertanyaan dan sebelah kiri Pak Salim Mengga dan nanti disusul sebelah kanan Pak Budi Youyastri.

Silakan Pak Salim.

F-PD (MAYJEN TNI (PURN.) SALIM MENGGGA):

**Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan.
Yang saya hormati unsur pimpinan Komisi I DPR RI,
Rekan-rekan sekalian.**

Saya sebenarnya ingin tahu secara spesifik posisi Vietnam dengan negara-negara yang ada berada di sekitar kawasan Laut China Selatan, sebab saya mendapatkan informasi bahwa Vietnam juga melaksanakan kerja sama militer dengan India, kalau saya tidak keliru dan secara berkala kapal-kapal India termasuk kapal selam itu berlabuh di Vietnam secara berkala. Kita juga tahu bahwa India dengan Vietnam memiliki sejarah yang sama, pengalaman yang sama dalam hubungannya dengan Tiongkok. India pernah terjadi perang perbatasan dengan Tiongkok dan kalau saya tidak salah Vietnam kalau tidak salah sekitar 1977 juga pernah terjadi perang perbatasan dan dia berhasil memukul tentara Tiongkok, memukul mundur tentara Tiongkok. Vietnam memang bisa menjadi kawan yang menguntungkan Indonesia, tetapi juga menjadi pesaing yang berat buat kita di kemudian hari dari semua aspek, militer dan ekonomi.

Yang ingin saya tanyakan Pak, apa *sih* Pak secara spesifik, bagaimana posisi Vietnam secara spesifik terhadap negara-negara yang berada di Laut China Selatan? Karena yang berada di Asia Selatan pun merasa berkepentingan untuk melakukan kerja sama, itu saja Pak pertanyaan saya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Salim.
Lanjut ke Pak Budi Youyastri.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Terima kasih Pimpinan.

**Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,
Bapak Narasumber.**

Saya mau bertanya dengan Pak Rodon, dengan Pak Anggoro, *nomer 1* itu *cuman* dapat cerita, konon kabarnya minta konfirmasi Vietnam itu kan bergabung dengan TPPS dengan balasan mereka mendapatkan bantuan peralatan militer *free grand* dari Amerika. Saya tidak tahu kebenarannya dan sebenarnya bentuknya apa saja, karena Pak Anggoro menyebutkan bahwa barang-barang peralatan Alutsistanya Vietnam mungkin banyak beli dari Rusia atau juga dapat bantuan dari Rusia, dengan argumen yang *kayaknya logic*, karena Vietnam lebih takut dengan China terhadap ancaman Laut China Selatan. Itu benar apa tidak pertanyaan saya terhadap bantuan *grand* dari Amerika kepada mereka dan apakah benar kemudian Vietnam akan lebih mungkin bergabung dengan "Pakta Pertahanannya NATO" lanjutan berikutnya. Nah, pertanyaannya jika benar apa untung ruginya buat Indonesia jika itu terjadi atau lebih tepatnya di

dalam perjanjian pertahanan militer kita dengan Vietnam, apa resiko yang harus kita terima dari China dan apa kemungkinan manfaatnya *support* Amerika menghadapi China dalam konteks *tukeran* dari kasus Papua, karena pasti *tukeran* kita. Kalau kita *belain* Amerika di Laut China Selatan, ya Papua harus dijamin aman, tidak dilepas dari negara kita. Itu saja Pak pertanyaannya, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak, 2 pertanyaan yang diajukan oleh Anggota.
Silakan Pak Gamari.

F-PKS (Dr. H.M. GAMARI SOETRISNO):

**Terima kasih Pimpinan.
Anggota yang saya hormati,
Para Narasumber yang terhormat.
*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para Narasumber yang telah memberikan masukan kepada kami terkait dengan *draft* Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa MoU ini sudah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Sosialis Vietnam dengan catatan yang tadi disampaikan kepada kita, memang ini tidak bisa serta merta, kemudian bisa kita sahkan sebelum ada revisi, terutama masalah-masalah yang menurut kita adalah masalah mendasar untuk direvisi. Biasanya memang apabila MoU ini sudah ditandatangani lalu kemudian dibahas di sini, itu alternatifnya hanya diterima atau ditolak? Nah kelihatannya kita akan menolak atau kita akan menerima dengan catatan. Menerima dengan catatan, artinya ini akan kita terima jika dilakukan perbaikan sesuai dengan catatan dari DPR atau dari Komisi I DPR RI. Nah setelah itu, maka jika pemerintah mau menerima atas catatan kita, maka akan disampaikan kembali kepada kita MoU yang baru, MoU yang sudah dengan catatan itu untuk kemudian kita bahas kembali, kan begitu mekanismenya.

Nah, saya ingin bertanya kepada para Narasumber ini, dalam hal Pemerintah tidak mau menerima catatan dari kita, ini akan mengantung terus, artinya tidak akan ratifikasi terhadap *draft* Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Komisi I DPR RI. Ada contoh mengenai masalah ini adalah masalah Rancangan Undang-Undang ratifikasi yang sebetulnya sudah sangat lama yang sampai sekarang juga tidak pernah kita ratifikasi, terutama dengan Singapura. Dengan Singapura pernah ada *draft* masuk ke sini, kemudian kita kembalikan kepada Pemerintah yang sampai hari ini juga tidak akan pernah masuk lagi ke sini. Ini kejadian bisa juga berulang seperti itu. Oleh sebab itu, saya ingin minta pandangan dari Narasumber dalam hal seperti itu, maka sebaiknya seperti apa? Karena prinsip kami setelah mendengar itu saya pribadi sebagai Anggota sependapat dengan para Narasumber, oke kita terima dengan berbagai pertimbangan itu, tetapi dengan catatan sebagai berikut yang nanti akan kami rumuskan. Oleh sebab itu Pak Narasumber, kami minta pandangan lebih lanjut mengenai persoalan ini.

Terima kasih Pimpinan.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Gamari Soetrisno dari PKS.

3 pertanyaan sudah diajukan oleh para Anggota, ada pertanyaan, pendalaman dan juga ada usulan.

Silakan kepada Bapak-Bapak, kami mulai kepada Pak Anggoro terlebih dahulu, silakan.

PAKAR (Dr. KUSNANTO ANGGORO):

Pertama dari Anggota Salim Mengga yang ingin memperdalam, mendiskusikan tentang posisi Vietnam bersama beberapa *literal stake* di Laut China Selatan. Ya, saya kira Vietnam bersama dengan Philipina tetap merupakan negara garis keras dalam konteks sengketa dengan Tiongkok. Philipina tahun 2013 itu mengajukan protes ke internasional arbitrase pada ... dan kelihatannya mendapatkan dukungan dari mereka, sehingga secara diplomatik sebenarnya Tiongkok dalam posisi yang agak sulit kali ini, dan Vietnam tahun lalu itu juga sebenarnya mulai mengancam untuk mengajukan persoalan itu. Jadi secara hukum saya kira Vietnam berada di kutub yang amat berlawanan dengan Tiongkok. Belum ditambah lagi persoalan-persoalan lain, misalnya adalah yang terkait dengan bantuan militer Amerika Serikat.

Saya kira dalam 2 tahun terakhir Amerika Serikat memang memberikan bantuan militer, baik kepada Philipina maupun kepada Vietnam, tetapi karakter daripada persenjataan yang diberikan oleh Amerika Serikat itu umumnya sangat terbatas. Jadi tidak termasuk dalam kategori *offensive weapon* dan umumnya itu termasuk dalam beberapa yang terkait dengan katakanlah untuk sistem pertahanan *defensive* saja, artinya adalah bahwa bantuan Amerika Serikat kepada Vietnam dan sesungguhnya juga kepada Philipina itu tidak akan mengubah *power balance* antara Vietnam dengan Tiongkok dalam konteks itu bisa dipastikan kalau terjadi perang dalam waktu panjang Vietnam dan bahkan sebenarnya seluruh negara Asia Tenggara ASEAN itu juga akan *keteteran* betul, bahwa dahulu pada tanggal 27 Maret 1979 itu Tang Sioping gagal ketika akan memberikan pelajaran kepada Vietnam, ternyata justru Vietnam yang memberi pelajaran kepada Tiongkok, tetapi waktu itu adalah hanya perang jangka pendek, hanya berakhir dalam waktu 6-7 hari saja, bukan sebuah *war of agretion* atau perang jangka panjang yang kalau itu terjadi kemungkinan besar Tiongkok memang masih berada dalam posisi yang lebih unggul. Jadi secara militer saya kira Vietnam ya memang agak jauh dibandingkan dengan Tiongkok.

Yang kedua, betul sekali bahwa Vietnam akan menjadi pesaing kita mau tidak mau di dalam bidang ekonomi maupun militer. Kesamaan antara Indonesia dengan Vietnam dari segi militer atau khususnya dari segi pembangunan kekuatan militer itu amat besar. Saya kira hampir merupakan tendensi umum di seluruh negara-negara Asia Tenggara dengan perkecualian Singapura, bahwa pembangunan kekuatan militer mereka, termasuk Indonesia adalah *platform sentrik*. Jadi beli kapal, beli pesawat, meningkatkan personil, membeli tank dan seterusnya, hanya Singapura yang memasukan unsur-unsur teknologikal. Mengingat di Indonesia sebenarnya kemampuan teknologi kita dalam 12 tahun terakhir justru menyusut, terlepas dari anggaran pertahanan yang semakin meningkat. Peningkatan *technological absorbtion* di lingkungan Angkatan Darat itu saya kira stagnan pada level 2% saja dalam waktu itu, untuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara masing-masing sekitar 4%. Jadi tidak cukup signifikan dari segi anggaran yang sudah dikeluarkan dari segi teknologi.

Nah, harapannya kemudian adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan kerja sama dengan Vietnam, yang tadi saya sebut bahwa salah satu keunggulan Vietnam jadi bukan keunggulan Vietnam di semua kerja sama militer, tetapi salah satu saja adalah dalam *network centric warfare* itu saya kira yang di Indonesia antara lain mau mengembangkan tentang beberapa hal yang lalu itu termasuk badan *cyber* nasional dan seterusnya. Jadi dalam konteks itu saya kira kita memang bisa sedikit menimba manfaat dari Vietnam.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI) :

Pimpinan, bisa sedikit pendalaman?

Pak Anggoro, kalau boleh tahu, apa kelebihanannya *network centric warfare*, sudah punya satelit mereka atau sudah punya regulasi atau sudah punya *backbond* komunikasinya kekuatan mereka atau di CMS-nya?

PAKAR (Dr. KUSNANTO ANGGORO):

Belum, jadi *network centric warfare* ini masih terbatas kepada sistem saja, terus kemudian termasuk di Angkatan Udara mereka yang kalau dibandingkan dengan Angkatan Udara Indonesia mungkin lebih kuat Vietnam kayak-nya untuk *Control Command Communication Surveillance Intelligent and Recognition* mereka yang kira-kira lebih unggul dibanding kita, belum tentang *backbond* dan seterusnya, karena ini juga merupakan sesuatu yang saya kira harus dicermati. Karena ada persoalan antara Vietnam dengan Rusia, satelit misalnya, masih mereka mendapatkan *backbond*-nya dari Rusia dan ada kemungkinan bahwa kerja sama antara Rusia dan Vietnam itu akan ditinjau ulang meskipun tentu saja akan sangat tergantung kepada beberapa persoalan di masa yang akan datang, misalnya akan sangat tergantung kepada seberapa jauh Rusia bisa menghimbau China, karena kalau kita melihat peta sejarah sampai tahun 1975, maka persaingan antara Rusia dan China yang kemudian dimenangkan oleh Rusia di dalam kasus Vietnam itu baru terjadi setelah adanya beberapa persoalan antara Vietnam dan China.

Jadi sekarang kan kembali lagi ada persoalan antara China dan Vietnam, masih sulit untuk ditebak saya kira segitiga antara Vietnam, Rusia, dan China itu. Hanya saja Indonesia hanya perlu melihat, bahwa hubungan antara Indonesia dengan Vietnam itu nampaknya lebih kohesif dibanding hubungan antara Vietnam dengan Rusia maupun Vietnam dan Tiongkok atau Vietnam dan China, ini menurut saya. Karena kalau dilihat dari segi perjuangan pada tahun-tahun 1945 mereka sampai tahun 1954, maka semangat nasionalisme Vietnam itu yang jauh lebih besar. Vietnam sendiri baru masuk dalam kubu sosialis internasional itu kurang lebih pada tahun 1975 sampai tahun 1986 itu, karena ketegangan mereka dengan Tiongkok.

Jadi saya kira Vietnam pada prinsipnya adalah merupakan menurut saya *independent* aktorlah. Jadi katakanlah saya tidak terlalu cemas kalau berteman dengan Vietnam, maka kemudian bisa dimanfaatkan oleh Rusia atau oleh Tiongkok satu saat. Jadi saya kira mereka cukup kuat dalam hal itu begitu ya. Jadi tadi resiko dengan Tiongkok mungkin ada ya, karena Tiongkok saya kira dalam beberapa tahun terakhir khususnya dalam 2 tahun terakhir memang sudah melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa, ada reklamasi, ada pembentukan *air street* dan *desperately* misalnya dan kemudian mereka sangat kesal dengan apa yang dilakukan oleh Vietnam dan Philipina, terutama menyangkut beberapa hal yang menyangkut tentang

konflik-konflik perbatasan itu, sehingga meningkatnya hubungan antara Indonesia dengan Vietnam itu bisa jadi akan membawa resiko tertentu, tetapi menurut saya persoalannya kan kadang-kadang bukan *whatever or not* ya, resiko pasti selalu ada, tetapi itu *what extend*, resiko itu ada.

Nah, menurut saya resikonya tidak terlalu besar, karena begini diplomasi itu kan sesuatu yang kadang-kadang ada yang bisa kita lihat dengan kasat mata, tetapi banyak yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata. Terlepas dari hiruk pikuk antara Hanoi dan Beijing, terlepas dari beberapa *rushment* yang dilakukan oleh *Chinese Maritime Authority* terhadap nelayan-nelayan Vietnam. Satu hal yang menarik adalah bahwa sejak 1 Januari 2014 itu antara Hanoi dan Peking itu dibuka *hotline of communication*, mereka sepakat bahwa kalau ada nelayan yang tertangkap atau kena masalah di laut itu harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 kali 24 jam. Terlepas dari bentrokan yang sering terjadi itu, ada juga unsur-unsur kedamaian. Sama dengan yang terjadi antara Tiongkok dengan Philipina, terlepas dari beberapa soal terkait dengan ..., pertikaian yang terjadi di Pulau Pelawan misalnya, tetapi investasi Tiongkok di Philipina dalam 2 tahun terakhir itu meningkat. Jadi tidak tahu saya kadang-kadang justru berpikir, bahwa hubungan internasional itu terdiri dari beberapa arus yang bisa silang selisih satu sama lain. Jadi polanya tidak harus interdependen, tetapi juga mutual independen antara satu dengan yang lain.

Jadi resiko saya kira selalu akan terjadi, seberapa jauh itu kemudian akan membawa katakanlah sesuatu ke Indonesia, dugaan saya tidak akan terlalu besar, maksud saya faktor Vietnam saya justru lebih cemas, kepada faktor-faktor lain dibanding faktor Vietnam dalam konteks hubungan antara Indonesia dan Tiongkok.

Nah mengenai TPP, sebagai salah satu *trade of* dengan apa yang diberikan oleh Amerika Serikat dalam itu, saya kira saya tidak bisa menjawab langsung apakah itu merupakan hubungan kausalitas atau *coincidence*, karena sesungguhnya dua-duanya itu dibicarakan di tempat-tempat yang terpisah, betul bahwa antara Amerika Serikat bersama 10 negara yang lain sudah berbicara dengan Vietnam dalam 2 tahun terakhir mengenai TPP, tetapi betul juga bahwa *Foreign Military Sails* Amerika Serikat juga sudah dibicarakan dengan Vietnam sekurang-kurangnya sejak tahun 2012. Jadi ini kira-kira kan hampir sama waktunya meskipun tidak harus berkaitan satu sama lain. Meskipun demikian hampir bisa dipastikan bahwa *Foreign Military Sails* yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Vietnam itu sampai sekarang masih masuk dalam kategori *non little weapon*, jadi senjata-senjata tidak ofensif, artinya adalah bahwa kemungkinan sangat kecil untuk bisa mengubah *power balance* di Asia Tenggara atau di Laut China Selatan. Jadi resiko secara militer dengan Indonesia saya kira tidak akan terlalu banyak, terutama terkait dengan Tiongkok. Saya lebih risau misalnya kalau dalam beberapa tahun ke depan, Vietnam juga melakukan *unilateral claim* di *South China Sea*, di kawasan ekonomi eksklusif. Ada beberapa hal yang kemungkinan besar memberikan indikasi pada itu. Pertama adalah bahwa katakanlah kalau kita ambil jarak terpendek antara Saigon dengan Natuna, maka itu akan melewati tempat minyak digali, rek 126 dan 128 milik Tiongkok dan itu jaraknya hanya sekitar 178 dari Natuna, 178 *nautical mile*, jadi kurang lebih 280 kilometer. Dengan demikian, maka itu hanya kurang lebih 80 kilometer saja dari garis terluar *claim* Indonesia, kalau kita melakukan *claim* sepihak. Jadi pada waktu itu saya kira bukan tidak mungkin kalau akan terjadi gesekan meskipun menurut saya, saya tidak akan terlalu risau, karena ada perbedaan konsep kedaulatan yang diberlakukan terhadap tanah dan konsep kedaulatan yang dilakukan terhadap zona Ekonomi Eksklusif. Zona Ekonomi Eksklusif bukanlah wilayah kedaulatan absolut bagi suatu negara, tetapi itu adalah wilayah untuk memiliki hak dalam pengelolaan bersama, tetapi itu justru

kemudian menimbulkan tuntutan, bahwa kedua belah pihak yang mempunyai intersepsi dari segi Zona Ekonomi Eksklusif perlu untuk berbicara satu sama lain. Itu juga yang menyebabkan saya mempunyai harapan bahwa kalau MoU ini bisa terus misalnya itu akan membuka ruang untuk memberi peluang baik kepada Indonesia maupun Vietnam untuk membicarakan mengenai beberapa hal yang lebih detail tentang pengelolaan ini itu dan sebagainya, terutama yang terkait dengan ini *marine resources*. Saya tidak terlalu risau tentang pertahanannya, tetapi justru ingin menggunakan itu sebagai salah satu hal untuk bisa mengembangkan kerja sama di bidang kemaritiman, terutama adalah *biodiversity* dan sebagainya, dan sebagainya.

Terakhir dari Pak Gamari dari PKS, wah ini pertanyaan politik saya kira, saya tidak bisa menjawab, tetapi kenapa tidak kita *bikin* sederhana saja. Sederhananya begini, ketika Dewan mengembalikan dengan catatan kepada Pemerintah itu, ya sebut saja pakai *deadline*. Jadi seperti beberapa pasal terkait dengan Undang-Undang TNI mengenai penolakan atau persetujuan Panglima misalnya itu kan disebut kalau tidak disetujui oleh DPR dalam tenggat waktu tertentu, maka akan begitu, ya gunakan saja teknik yang sama itu kira-kira begitu. Lalu posisinya tergantung, maksud saya tergantung Komisi I DPR RI mau setuju apa tidak mengenai MoU ini menjadi Rancangan Undang-Undang, tetapi sekali lagi saya setuju bahwa harus dilakukan catatan, revisi, keberatan, yang kedua adalah permohonan untuk dilakukan perubahan dan ketiga mungkin adalah semacam pernyataan yang mengatakan kalau perubahan itu tidak diterima oleh DPR dalam waktu tergantung berapalah, maka kemudian ini artinya apakah terus menjadi Undang-Undang atau tidak. Saya kira jawabannya politik juga Pak Gamari.

Saya kira itu yang bisa saya berikan, sekedar catatan satu lagi kepada Pak Salim Mengga, betul Vietnam, India kerja sama militernya luar biasa, tetapi ini memang bagaimana ya untuk mengatakan karena di satu pihak India juga sudah lama melakukan semacam ... *policy*. Jadi mencoba untuk mencari jalan ke timur dan seterusnya itu, dia agak terbelenggu di sebelah barat saja untuk jangka waktu yang lama, tetapi sesungguhnya sudah lama dia mempunyai pengaruh yang sudah sangat kuat di beberapa negara, khususnya dengan Vietnam. Persinggungan antara mereka berdua itu dipererat, karena sama-sama mendapatkan teknologi persenjataan dari Rusia, tetapi bahwa kerja sama antara mereka berdua itu juga menurut saya juga wajar dan dugaan saya akan menjadi semakin erat di kelak kemudian hari. Alasannya sederhana saja, karena Tiongkok juga sudah melakukan banyak muhibah, saya kira induk Myoming mulai jalan-jalan sampai ke Afrika, Tiongkok sekarang kabar baiknya atau kabar buruknya *monggo kerso* sedang bernegosiasi dengan Pakistan untuk mendapatkan pangkalan wadah yang kurang lebih jaraknya sekitar per 370 kilo meter sebelah utara ke ... Jadi dengan demikian, maka garis lintang antara Singapura itu kira-kira bisa terpotong mulai dari titik timur yang dikuasai katakanlah Vietnam terus kemudian di Teluk ... atau mungkin sampai Qadar, kalau itu terjadi ya, maka nanti banyak pekerjaan saya kira Komisi I DPR RI untuk membicarakan beberapa hal yang sangat panas. Saya tidak terlalu risau betul mengenai pertemanan antara India dan Vietnam, saya justru membayangkannya begini, ini justru mencari peluang, Rusia kita tahu kita akan mempunyai persenjataan dari Rusia dan sudah memiliki beberapa diantaranya. Rusia dikenal sebagai salah satu negara yang tidak terlalu patuh kepada *after sale maintenance* atau sulit untuk menempatkan *sparepart* dan *training* dan sebagainya langsung dari Rusia. Ini salah satu kelemahan Rusia dari segi substansi.

Kedua, walaupun mereka mau pada umumnya mereka terpaksa menggunakan makelar beberapa diantaranya adalah perusahaan dari Perancis, Tales, adalah salah satu diantaranya. Nah dalam kontens itu maka bukan tidak mungkin bahwa negara-negara yang memiliki

hubungan pertahanan dan militer erat dengan Rusia, dalam hal ini adalah India dan Vietnam itu bisa menjadi *intermediary* atau tempat apa sesuatu yang kita tidak dapatkan dari Rusia barangkali bisa kita dapatkan dari Vietnam atau India. Untuk itulah maka Vietnam itu menjadi instrumental di dalam konteks itu untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia. Meskipun kita juga tidak mungkin berharap terlalu banyak karena dalam kesepakatan antara Vietnam dengan Rusia selalu ada kesepakatan bagi negara, misalnya Vietnam untuk tidak memberikan sesuatu kepada pihak ketiga, tetapi bisa dipastikan bahwa *third party agreement* itu tidak termasuk untuk latihan yang diberikan kepada misalnya adalah personil pilot dan sebagainya. Kalau senjatanya masuk *third party agreement*, tetapi pilot, lalu *skill* dalam *maintenance* dan sebagainya itu tidak. Jadi itu kembali lagi kepada apa yang tertuang di dalam memorandum, termasuk diantaranya ada latihan dan pendidikan, serta kerja sama teknologi. Dan saya kira masih bisa dimanfaatkanlah Vietnam itu. *Cuman* ya itu tadi kecemasan saya, karena ini ... nya kan tidak ada di dalam MoU.

Sekedar sebagai catatan barangkali tambahan untuk Pak Gamari lagi, nanti di dalam catatan kepada Pemerintah seandainya dikembalikan harus ditanya diberi kewajiban kepada Pemerintah bahwa Pemerintah harus memberikan *update* kepada DPR paling tidak 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali atau 2 bulan sekali, terserah, tetapi intinya adalah bahwa harus ada waktu tertentu yang dinyatakan di dalam catatan DPR berbagai sebuah tenggak kepada DPR untuk bisa bertanya kepada pihak Pemerintah tentang bagaimana perkembangan-perkembangan dan mengenai pelaksanaan Undang-Undang atau MoU ini.

Saya kira itu yang bisa saya katakan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Anggoro.

Kita semakin lengkap atau semakin bingung, saya berharap dari 3 Narasumber ini akan mengerucut. Kalau sekarang ini masih kita lihat, kalau kita perhatikan baik-baik, apa yang disampaikan oleh Pak Anggoro lebih banyak manfaatnya daripada moderatnya apabila kita membangun kerja sama ini dengan Vietnam. Paling tidak itu tadi kebergantungan kita terhadap *after sale* dari Sukhoi, kemudian mohon maaf ini kepada Pak Teuku Reza memang dalam perspektif kemampuan maritim kita melihat, bahwa memang Vietnam agak sedikit lebih maju dibandingkan kita, sedangkan kita adalah negara maritim, tetapi kalau kita bicara kesiapan baik dari infrastruktur maupun dari dukungan politik, kita lihat bahwa Vietnam memang sedikit beberapa langkah di depan kita.

Jadi ini yang paling tidak bisa kita garisbawahi dari penjelasan komprehensif yang disampaikan oleh Pak Anggoro, kita lihatlah nanti di ujungnya akan seperti apa. Apakah kita sepakat akan maju ke ratifikasi atau kita *hold* dahulu atau di-*redundant* nantinya dengan kesepakatan kerja sama yang sudah kita miliki saat ini.

Berikut ke Pak Rodon terlebih dahulu.

PAKAR (KOLONEL INF. Dr. Rer. Pol. RODON PEDRASON, M.A.):

Terima kasih.

Kalau tadi Mas Kus sudah bicara panjang lebar tentang menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Dewan, saya mencoba menjawabnya dengan lebih *simple* Pak ketua. Mas Kus panjang lebar, karena pengalamannya lebih banyak dari saya, beliau guru saya.

Begini Pak, secara spesifik posisi Vietnam terhadap Negara-negara di Laut China Selatan saya melihatnya begini, ada pergeseran prinsip dalam pergaulan internasional yang sekarang ini diterapkan oleh Vietnam. Kalau kita kembali me-*refer* atau merujuk kepada sejarahnya ASEAN ataupun berbagai organisasi yang pernah dibentuk di kawasan kita ini, mulai dari SEATO, kemudian MAFINDO dan seterusnya, terakhir ada ASEAN. Pada saat itu adalah kecenderungan Vietnam memandang semua organisasi yang dibentuk di kawasan kita itu merupakan bentukan negeri-negeri kolonial, terutama dalam lini spesifik dia mengatakan ini bentukan Amerika Serikat, sehingga ada rasa enggan Vietnam untuk bergabung pada saat itu, tetapi setelah mereka menyadari pentingnya peran ASEAN di kawasan kita ini dan akhirnya Vietnam bergabung anggapan bahwa negara besar *major power*, seperti Amerika tersebut sedikit berubah dan saat inipun kembali mulai bergeser, yang semula mereka alergi terhadap keberadaan *major power*, seperti Amerika di kawasan kita, mau tidak mau Vietnam bersikap adaptif dalam kondisi yang ada. Kalau kita sebutkan, misalnya bagaimana pola hubungan kita dengan Vietnam dan bagaimana pengaruhnya terhadap kita di kawasan, kita juga perlu melihat kembali, bahwa di dalam pembentukan ASEAN ada yang selalu merendahkan kepada yang namanya TEC (*Treaty of Emity Cooperation*). Ini selalu menjadi rujukan negara-negara ASEAN di dalam menentukan sikap di dalam apakah dia sama. Dari TEC inilah akhirnya berkembang konsep-konsep ASEAN way, dimana dalam artian terkadang memang tidak menyelesaikan masalah, tetapi lebih kepada membuat masalah itu, tenang, dan tidak berkembang lebih jauh.

Jadi setiap negara yang terlibat di dalam kompetisi atau dalam sengketa itu akhirnya mencoba untuk saling menahan diri untuk tidak melakukan manuver atau *moving* apapun. Jadi kalau menurut pertimbangan saya jika Indonesia dengan Vietnam sepertinya lebih dekat apakah itu akan menimbulkan rasa curiga, katakanlah rasa cemburu antara negara satu dengan lainnya, tidak karena sifatnya bilateral. Bilateral adalah merupakan keputusan dan kebijakan politik yang dibangun oleh dua negara dalam menentukan derajat hubungan Pemerintah, baik itu militer maupun secara politik ataupun berbagai unsur lain. Setiap negara memiliki kebebasan di dalam menentukan langkahnya, setiap negara bebas berdialog atau bekerja sama dengan negara lain dan itu dijamin di dalam piagam yang ada di ASEAN, sehingga kalau tidak berpengaruh, secara *official* tidak akan berpengaruh terhadap hubungan Indonesia dan negara lainnya.

Lalu kita coba lihat kembali bagaimana reaksi katakanlah China atau Amerika Serikat terhadap kerja sama ini, kita juga melihat saat ini di kawasan kita berkembang bentuk kerja sama atau pola-pola kerja sama yang dikembangkan oleh ASEAN, ada ADMM yang sekarang ADMM plus, ada 10 negara ASEAN di sana, kemudian ditambah dengan 8 negara sebagai *partner* di dalam forum tersebut. *Partner* tersebut termasuk ada China, ada Amerika, ada Rusia, dan seterusnya, ada 8 negara, sehingga di dalam proses dialog politiknya ataupun kerja sama pertahanannya forum ini menjadi wadah untuk meningkatkan *strategic trust* kepada mereka atau katakanlah adanya ruang dialog antara negara-negara yang terlibat di dalam forum tersebut. Sehingga tidaklah dapat serta merta katakanlah kondisi menjadi tidak kondusif bagi kawasan kita. Sejauh memang *claim-claim* yang dilakukan oleh negara-negara terhadap isu di Laut China Selatan tidak menimbulkan manuver-manuver yang lebih jauh, karena setiap negara saat ini sedang menempatkan dirinya untuk mengamati satu sama lain. Memang ada seperti China tetap melanjutkan *claim*-nya terhadap wilayah yang ada Laut China Selatan yang diyakini kaya dengan

berbagai sumber minyak, yaitu mereka sekarang *the 9 dashline*-nya itu sudah masuk ke wilayah kita, tetapi kita juga lihat bahwa Indonesia sampai saat ini tidak terlalu resah terhadap *claim* yang disampaikan oleh China tersebut, karena Indonesia juga dengan terang menyatakan tidak mengakui *claim* yang dilakukan oleh China.

Di dalam pola hubungan Indonesia dengan China, kita tahu bersama bahwa Indonesia berusaha membawa persoalan ASEAN ini atau negara-negara yang menjadi *claimant* di wilayah tersebut menjadi sebuah persoalan ASEAN, bukan lagi persoalan individu negara-negara tersebut, tetapi China kita lihat tidak mau terjadi dialog antara mereka dengan ASEAN sebagai sebuah entitas, tetapi mereka ingin mengatakan dialog bilateral dengan negara tersebut. Peluang-peluang inilah yang sebetulnya menurut saya menjadi titik lemah kerja sama ASEAN dengan negara lain, sebab di dalam kerja sama ini negara-negara tersebut memanfaatkan klausul tentang kebebasannya negara tersebut berkolaborasi dengan negara lain bila menyangkut masalah kepentingan nasional mereka. Meskipun apabila menyangkut masalah kepentingan regional, kepentingan nasional tersebut ditempatkan di bawah atau bukanlah di atas permukaan, seperti kepentingan regional. Namun kita juga tahu secara pasti negara-negara tersebut berusaha menarik keuntungan dengan sikap yang dikembangkan oleh ASEAN, tetapi saya optimis bahwa negara-negara ASEAN tidaklah akan berpengaruh dengan bentuk kerja sama yang akan dibangun oleh Indonesia dengan Vietnam, sebab di dalam bentuk kerja sama pertahanan ini atau katakanlah kita sebutkan saja sebuah diplomasi pertahanan itu murni merupakan hubungan bilateral, kalau dalam sifatnya multilateral lebih kepada kerja sama pengamanan perbatasan maritim atau laut seperti yang dilakukan oleh negara-negara liberal *state* yang sudah berlangsung antara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan akhirnya Thailand ikut di sana.

Jadi ada semangat kerja sama di sini, semangat untuk menumbuhkan rasa saling percaya melalui diplomasi pertahanan. Karena bukankah diplomasi pertahanan itu merupakan sebuah bentuk kerja sama antar negara, meskipun negara tersebut sebenarnya sedang melakukan kompetisi, entah kompetisi di bidang pengetahuan, entahkah itu kompetisi di dalam memodernisasi senjatanya yang belum tentu disebut sebuah perlombaan senjata di situ.

Jadi seperti yang disampaikan tadi saya optimis tentang masalah ini bahwa kerja sama bilateral antara negara Indonesia dengan Vietnam tidaklah akan mempengaruhi bentuk hubungan Indonesia dengan negara lainnya. Sejauh memang bahwa Indonesia dengan Vietnam memiliki hubungan diplomatik. Saya ingat isu tahun 2001 waktu itu yang barangkali tidak sampai ke forum atau apa bahwa Taiwan atau China Taipei pada waktu itu menawarkan secara gratis untuk 2 *sub marine*, kapal selam, tetapi tentunya pada saat itu dari Mabes TNI menolak, sebab Indonesia cukup khawatir dengan reaksi China apabila Indonesia menerima tawaran yang diberikan oleh Taiwan tersebut.

Bila kita melihat potensi yang ada saat ini atau situasi yang ada saat ini di kawasan kita, negara-negara yang bersengketa, terutama di wilayah tertentu tidaklah melihat bentuk kerja sama Indonesia dengan Vietnam sebagai bentuk usaha atau kerja sama membantu *claimant* dalam hal ini Vietnam di dalam mendukung *claim* tersebut. Jadi artinya bentuk kerja sama yang akan kita bangun bukanlah kerja sama pertahanan untuk memberikan dukungan persenjataan, dukungan militer, karena persoalan tersebut bukanlah persoalan bilateral, tetapi menjadi persoalan multilateral, bila berbicara tentang masalah perbantuan persenjataan tersebut.

Kita juga perlu melihat ulang kembali tentang reputasi negara, bahwa kita sebutkan ASEAN, bahwa Vietnam merupakan negara besar, Indonesia merupakan negara besar, dua-dua

negara memiliki peran yang sangat *crucial* di kawasan kita, tetapi sejauh ini tidak pernah ada sejarah dalam berbagai pertemuan, entahkah itu ASEAN atau pertemuan tingkat tinggi lainnya yang persoalan bermula dari Indonesia atau Vietnam. Tidak ada satupun isu yang pernah kita lihat bahwa persoalan ini yang dibawa sampai adanya *settle* diplomasi atau segala macam berasal dari Vietnam atau Indonesia. Jadi hubungan bilateral tetaplah merupakan hubungan bilateral, kebijakan luar negeri yang dibangun oleh sebuah negara tetaplah merupakan kebijakan luar negeri yang telah dikonsultasikan entah itu bersama rakyat, entah itu melalui Dewan, namun tidak terlepas di situ adalah sisi perilaku, pengambil keputusan dengan mempertimbangkan situasi atau lingkungan strategik yang berkembang saat itu.

Lalu kira-kira apa yang akan diterima oleh Indonesia atau Vietnam jika China katakanlah merasa tidak berpuas hati atau China merasa ada kesepakatan tertentu antar negara ASEAN. Seperti yang saya gambarkan tadi dari awal, bahwa upaya negara tertentu di kawasan kita untuk membawa persoalan negara tertentu di ASEAN menjadi persoalan ASEAN secara entitas selalu diantisipasi oleh China. Kita beberapa kali mengundang China dalam Shangrila dialog, Jakarta *International Defence Dialog*, China sebelum membuat keputusan selalu akan meminta kepada kita *draft* atau nama-nama delegasi yang akan datang dari negara ASEAN. Barulah mereka akan memutuskan nanti siapa yang akan menghadiri semua dialog tersebut.

Jadi kita juga melihat China tidak serta merta menyatakan bahwa mereka tidak mau hadir, bahwa mereka juga akan *oppose* tidak, tetapi mereka juga melihat seberapa jauh perkembangan atau dinamika politik yang terjadi di dalam bentuk kerja sama antar negara ASEAN maupun negara-negara *partner* lainnya. Di dalam ranah politik tentu Bapak lebih tahu dari saya bahwa tidak bisa kita mengatakan tindakan A yang berlaku juga akan dibalas dengan tindakan B dan seterusnya, tetapi lebih kepada ada proses-proses politik tertentu yang mereka lakukan, sehingga situasi tidak menjadi lebih panas atau tidak lagi memiliki kepastian sama sekali, karena setiap negara memiliki kalkulasi-kalkulasi politik tertentu di dalam membuat keputusannya terhadap sebuah negara.

Kita sebetulnya juga tidak perlu terlalu cemas tentang apakah nanti tindakan negara, seperti negara besar terhadap Indonesia. Kita melihat bahwa di kawasan kita ini ada terjadi *revalry* atau kompetisi negara-negara besar, lebih kepada hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika dan China. Kalkulasi-kalkulasi ini menjadi pertimbangan untuk negara-negara lainnya di dalam membuat keputusan politik bagi negara kita, dan menurut saya kita juga tidak terlalu pesimis mengenai potensi kita di dalam hubungan bilateral atau multilateral di kawasan ini. Karena sudah waktunya *sih* sebetulnya kita menyatakan negara kita negara besar, memiliki tingkat negosiasi yang bagus. Kemudian memiliki kartu-kartu yang bisa kita perjuangkan di dalam menentukan langkah kita, di dalam membangun kerja sama, entah itu bilateral secara khusus dengan Vietnam.

Kemudian yang disampaikan terakhir bagaimana jika MoU ini ditolak? Ya, jawabannya sama seperti yang disampaikan Mas Kus tadi, bahwa ini adalah sebuah proses politik Pak, tetapi ada pesan yang kita titipkan di sini, bahwa di dalam MoU atau nanti diubah menjadi Undang-Undang ini perlu ada klausul kapan dia di-*review*, kapan dia ditinjau ulang, kemudian kapan masa berlakunya, dan kapan masa berakhirnya. Saya masih ingat Pak, itu ada salah satu perjanjian kita dengan Amerika tentang keberadaan pesawat C12 yang di Halim, itu di dalam perjanjian tersebut sejak 20 tahun lebih itu tidak tahu Pak, kapan mulainya perjanjian itu berlaku, kapan berakhirnya, sehingga begitu pihak Indonesia mencoba mengajak negara itu berdialog mereka menolak. Bayangkan Pak, dalam 1 hari berapa *ground handling* yang harus dibayar oleh

mereka kompensasi, tetapi kita sampai sekarang tidak pernah berhasil. Karena memang ada kekeliruan kita di dalam membuat Undang-Undang atau membuat MoU ini. Mohon ini diwaspadai Bapak-Bapak, bahwa harus jelas kapan berlakunya, kapan berakhirnya, dan kapan ditinjau kembali Pak, sebab ini sangat merugikan kita, banyak itu MoU-MoU tersebut yang terkadang terbengkalai, terkadang kita lupakan, atau barangkali juga ada perjanjian yang kita singgung sedikit, perjanjian tentang masalah *military training area* segala macam. Kebetulan kita terlibat langsung dalam proses itu, saya sangat khawatir dengan pola-pola yang dikembangkan negara tertentu di dalam mengeksploitasi berbagai potensi yang ada di wilayah kita, tetapi kembali kepada masalah hubungan Indonesia dengan Vietnam, saya optimis Pak, sejauh ini kita tidak mempunyai masalah-masalah *crucial* dengan Vietnam dan juga belum ada selentingan berita apapun yang berkaitan dengan masalah kerja sama kita ini menjadi sebuah duri dalam daging dalam hubungan dengan negara lainnya, terutama antara sesama negara ASEAN.

Saya kira itu jawaban saya Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak.
Giliran Pak Reza.

PAKAR (Dr. TEUKU REZASYAH):

Terima kasih kepada Pak Salim, Pak Budi juga Pak Gamari.

Dalam konteks Laut China Selatan dalam pandangan saya, beberapa negara *claimant* tersebut, Philipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei, maka Vietnam ini adalah negara yang paling aktif menolak China. Ini dibuktikan dengan seringnya dia melakukan latihan militer laut dengan AS dan juga Jepang, dan Vietnam di sini sangat pintar memainkan diri dalam persaingan AS lawan China dan juga Jepang lawan China. Misalnya Vietnam berhasil mendapatkan bantuan kapal patroli yang khusus dibuat untuk Vietnam. Kemudian kerja sama dia dengan India harus diakui ini faktor sejarah, dalam teori namanya *mutual preception*, masing-masing pernah berhadapan dengan China dan masing-masing babak belur. Khusus bagi India, dia memerlukan jaminan dari ASEAN, dia sudah dapat jaminan Selat Malaka, kemudian dari Vietnam dia mengharap jaminan di perairan Indo China. Jadi ada pengalaman sejarah dan juga ada kesamaan strategik ke depan. Saya pernah mengajukan pertanyaan hipotetis kepada kalangan pertahanan Jepang, kalau terjadi sesuatu dengan China di Asia bagaimana? Mereka bilang saya tahu yang *you* maksud China akan mem-*bully* ASEAN, Jepang tidak akan tinggal diam malah, ini janji dari Jepang dan untuk itu tentunya kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan kepada Jepang agar dia juga memberikan kapal-kapal patroli kepada kita seperti yang sudah dia lakukan untuk Vietnam.

Kemudian untuk Pak Budi, kenapa Vietnam ikut TPP, izinkan saya membagikan pengalaman saya ketemu dengan Duta Besar Vietnam, namanya Ambassador Huang An Tuan tanggal 5 November tahun ini Pak. Mengapa kok Vietnam berani-beraninya ikut TPP, pertanyaannya adalah dia terlibat sejak dini, jadi dia bisa mengatur protokol, prosedur NOMS. Kemudian ikut TPP memberikan dia rasa percaya diri yang lebih tinggi, sehingga dia bisa ikutan yang namanya RICP. Kemudian pada saat yang sama dalam menjadi Anggota penuh dari TPP dia sadar akan keterbatasan dia, keterbatasan Vietnam, terutama sekali di bidang *unskill labour*

and low productivity, tetapi hebatnya Vietnam dia sudah membangun namanya *programatic action* Pak, jelas pencapaian dia dari tahun ke tahun. Jadi menurut penjelasan Dubes Huang An Tuan tersebut, ikut TPP akan menaikkan Vietnam punya *level of playing field*, Vietnam punya *level of competitiveness* dan juga Vietnam punya *level of achievement*, sampai TPP ini *full* Vietnam sudah memiliki istilahnya *incremental development in the area of shipping*, ini konsentrasi dia yang utama *shipping*. Jadi kalau nanti kita berhubungan dengan Vietnam untuk mengoperasionalkan Undang-Undang ini, ya kekuatan dia itu memang di *shipping* Pak. Dia bisa mengkombinasikan kekuatan dia sendiri, bantuan dari Jepang dan juga bantuan dari negara-negara TPP yang lain. Kalau nanti Rancangan Undang-Undang ini jadi bagaimana kalau RRC marah? Ya RRC selalu marah, RRC selalu mengatakan ya kalian kan punya *One China Policy*, kenapa *bikin-bikin movement* yang menyinggung kami? Di situlah perlunya Ahli-Ahli Diplomasi Militer, di sini sudah ada Bapak Kolonel Rodon itu sedikit dari Ahli Pakar Diplomasi Militer Indonesia. Mohon kita coba juga, kita ulangi keberhasilan kita tahun 1996 dahulu Pak, pada saat kita menandatangani perjanjian dengan Australia yang namanya *Agreement of Mutual Security* tahun 1996 bulan Desember minggu kedua. China *ngambek*, tetapi Indonesia berhasil melakukan pendekatan khusus kepada China yang intinya adalah *Agreement* ini tidak ditujukan kepada pihak manapun. *Agreement* ini tujuannya adalah untuk membangun kemitraan, kira-kira begitu Pak.

Selanjutnya untuk Pak Gamari, bagaimana kalau Pemerintah menolak? Nah, ini memang studi kasus saya adalah *defence cooperation* Indonesia-Singapura Pak, dimana dengan berlangsungnya kerja sama ini terjadi *status quo* Pak. *Status Quo* ini ada pihak yang untung Pak ternyata, pihak yang untung itu antara lain adalah Kementerian Perhubungan Pak. Kementerian Perhubungan jadi intinya yang terjadi di atas wilayah udara itu kan diatur oleh Singapura Pak, itu ada izin macam-macam. Nah, izin itu bayar, bayarnya ke Singapura, kemudian Singapura itu tidak langsung *cash* ke kita Pak, didata dahulu sekian lama, dan baru ditransfer, dan itu tentunya ada *transfer cost*. Sementara sampai ini beres 2 tahun ke depan konon kalau kita bisa, ada *status quo* yang menguntungkan Indonesia, terutama sekali Kementerian Perhubungan, kemudian menguntungkan juga Kementerian Teknis yang lain dalam artian kita tidak bersengketa dengan Singapura, ada 2 tahun untuk latihan Pak. Latihan pemberdayaan manusia dan juga latihan pembelian infrastruktur. Selanjutnya bagaimana dengan Pemerintah kalau Pemerintah mendiamkan ini? Ya tentunya harus *pinter-pinteran* Parlemen membedah Pak, membedah ya, tunjukkan kepada Pemerintah MoU yang anda buat tersebut kan banyak bolongnya Pak, antara lain kata kunci "PNG" kok ada di situ? Kemudian kata kunci misalnya di pasal terakhir itu, keputusan harus dibuat oleh dua orang Ketua, Ketua dari pihak kita dan Ketua dari pihak Vietnam. Kita bisa katakan ya kalau MoU-nya tidak dirubah tidak diperbaiki ya ini berbahaya Pak dan untuk itu harus prinsip kesetaraan itu harus kita katakan dan selanjutnya kita sadar kerja sama sama Vietnam itu penting, kalau Pemerintah masih misalnya belum memutuskan prakarsai saja Pak kerja sama bilateral *non* Pemerintah. Kampus kami sering kedatangan orang Vietnam, ingin kerja sama dengan *riset center* yang berhubungan dengan kelautan Pak. Contohnya Dubes Vietnam dalam waktu 1 bulan dari kedatangannya di Indonesia itu sudah dua kali berkunjung ke *President University* Pak, dua kali saya yang memimpin seminarnya dua kali, dan di situ beliau menggali potensi industri yang ada di Jababeka Pak. Di mana sebelum MoU ini jadi Undang-Undang, dia sudah punya gula-gula, perusahaan mana dari Indonesia yang bisa dioptimalkan untuk Vietnam tersebut, dan untuk itu terus terang saya belum menemukan bahwa kita punya pakar Vietnam.

Jadi untuk suatu hubungan baik di *level defence*, kita belum punya mungkin di Athan ada ya Pak? Mohon Pak perbanyak Ahli Indonesia, Ahli Wilayah dan juga dari Direktorat Kerja sama Internasional Strahan agar ada *Senior Officer* yang bisa berbahasa Vietnam.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak.

Semua pertanyaan sudah ditanggapi, kita masih ada waktu kurang lebih 25 menit, apakah masih ada yang ingin melakukan pendalaman atau pertanyaan?

Pak Bobby, silakan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., MBA., CFE.):

Terima kasih.

Jadi kepada ketiga Narasumber, saya tadi sudah melihat *paper*-nya juga paparan sangat baik. Jadi sebenarnya tidak ada terlalu implikasi negatif kalau kita mengesahkan ini, tetapi mohon pandangannya dari ketiga Narasumber. Karena pertama, dengan kerja sama di bidang pertahanan ini yang paling utama adalah kita membuka data intelijen untuk *sharing*. Nah, melihat perselisihan tapal batas kita yang sepertinya dalam waktu 10 tahun ke depan itu belum akan ketemu, karena Indonesia terhadap Pulau Sekatong itu masih menggunakan UNCLOS, sedangkan mereka itu berdasarkan landasan kontinen, itu 10 tahun ke depan itu rasanya belum ada titik temu.

Nah, di bidang pertahanan ini kita juga melihat, bahwa Vietnam ini Alutsistanya seperti kita, 50:50, walaupun mereka lebih banyak dipasok Rusia, tetapi sekarang Amerika pun sudah mulai masuk di sana. Nah, masuk di sana paling utama lagi pengayaan uranium, pengayaan uranium untuk nuklir itu mereka berikan kepada Vietnam walaupun ke Taiwan dan Jepang, Amerika tidak memberikan izin tersebut. Nah, kita sampai hari ini masalah pengayaan uranium untuk bukan senjata nuklir untuk sumber energi saja masih belum disepakati. Apakah dalam konteks MoU ini itu Vietnam bisa menjadi proxy-nya Amerika dalam mengawasi kita juga? Karena dalam sistem Alutsista kita, kita ada separuh sistem NATO, tetapi kalau untuk udara kita lebih *condong* ke Rusia. Nah, terkait yang baru-baru ini benar mereka bisa dijadikan proxy, bahwa kalau kita diembargo bisa ambil sedikit-sedikit *spare part* dari Vietnam itu sudah dilakukan, contohnya untuk *spare part* helikopter tempur kita. Akan tetapi kan sekarang kita juga masih dalam dilematis untuk mengambil persenjataan Sukhoi.

Nah, ini yang apakah perjanjian ini memiliki efek, bahwa Vietnam itu secara tidak langsung menjadi proxy intelijen Amerika untuk melihat kita juga. Lantas kedua, karena terbukanya kerja sama di bidang maritim, kita juga melihat maritim militer Vietnam ini juga berkembang, kapal selam-kapal selam kita saja baru menyamai mereka, kita baru sama-sama punya kapal selam kelas 109 yang di Korea itu, tetapi untuk lawan China Selatan kita masih perlu kilo klas dan mereka pun akan beli kilo klas. Jadi bisa dikatakan armada laut kita ini setara.

Nah, terkait dengan jalur laut ini, kita tahu bahwa Vietnam ini kan sudah memiliki kelebihan dalam TPP, seperti tadi dikatakan oleh Bapak, karena mereka ikut mendesain. Nilai investasi Amerika di Vietnam pun sudah hampir cukup signifikan dibandingkan pertumbuhan nilai investasi Amerika di Indonesia. Nah, sekali lagi apakah dengan MoU ini dimana yang paling

utama itu adalah pertukaran data intelijen yang kita tidak tahu dimana batasnya data intelejen tersebut, ini bisa mempengaruhi perekonomian kita. Minimal kan kalau mereka sudah menguasai data intelijen di laut itu mereka tahu berapa banyak kapal dan volume barang-barang importasi ke Indonesia. Berapa banyak barang China bisa masuk ke kita, berapa banyak barang Philipina, berapa banyak kapal-kapal dari Timur Tengah itu masuk ke tempat kita? Nah, itu yang ingin saya tanyakan.

Dan terakhir apakah dengan pertukaran data intelijen yang dimasukkan di dalam perjanjian ini, kita ini sekarang mempunyai *common enemy*, namanya ISIS. Nah, dengan adanya ISIS ini, bantuan Amerika terhadap militer dan juga aparat keamanan kita di Indonesia itu cukup signifikan berupa peralatan di Polri ataupun itu di militer.

Nah, kiranya dengan terbukanya akses intelijen kawasan, nanti diperbandingkan dengan Amerika, karena mereka terus terang sama Amerika juga lagi mesra-mesranya juga itu akan punya efek ke kita tidak? Atau dengan bahasa lainnya begini *deh*, selama ini kan data tersebut mengenai perkembangan ISIS di Indonesia ini yang tahu hanya kita, hanya Indonesia, berdasarkan itulah arapat kita militer kita bisa mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Nah, kalau data ini sudah ke-*share* juga, mereka sudah tahu juga perkembangan ISIS, karena ada kerja sama militer dan intelijen, apakah bisa merubah kiranya kontribusi Amerika. Jadi saya lebih melihat dengan perjanjian ini bukan masalah hubungan bilateral Vietnam dengan kita saja, tetapi kita ingin memastikan bahwa data itu bukannya menjadi proxy Amerika untuk diserap melalui Vietnam.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Bobby ini, hampir tercecer ini Pak pertanyaannya ini, tetapi diingatkan oleh Pak Bobby.

Baik, jika tidak ada lagi dari Anggota saya tawarkan dari Pimpinan, masih ada?

F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.):

Ini ketika kita melihat atau rencana kerja sama pertahanan kita dengan Vietnam suasana atau nuansa pembicaraan kita ini menganggap tadi sempat disinggung oleh Pak Teuku Rezasyah dianggap lebih unggul, sehingga muncul kecurigaan-kecurigaan yang menganggap kita ini kalau nanti sudah benar kita ratifikasi, lantas jangan-jangan kita ini tidak diuntungkan, tidak *mutually beneficial* begitu, tetapi justru Vietnam dengan segala macam analisis tadi itu lebih diuntungkan, sehingga apa yang perlu didorong oleh Pemerintah, karena ini kan *leading sector*-nya Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertahanan yang tertulis di MoU. Yang perlu atau harus dijamin bahwa ketika kita jalan dengan Vietnam ini, maka memang kita punya kepentingan nasional, punya kepentingan pertahanan yang *mutually beneficial*, sehingga kecurigaan-kecurigaan itu bisa terbantahkan, kalau kemudian sudah kita *teken*, itu yang pertama. Kira-kira apa arahan untuk Pemerintah, usulan dari Bapak-Bapak supaya ini membawa keuntungan bagi kita.

Yang kedua, saya kurang mengetahui secara detail politik luar negeri Vietnam ini seperti apa orientasinya? Kalau kita ini kan bebas aktif Pak, kalau Vietnam itu apakah sama atau dia bisa membuat Pakta Pertahanan dengan negara-negara lain? Kalau ternyata yang kedua itu dia bisa itu, artinya berarti ya kita ini mungkin kalau sudah MoU tidak terlalu dianggap sebagai

partner yang strategis, karena tidak membuat Pakta Pertahanan dengan negara lain. Nah, kalau Vietnam mungkin siapa tahu, saya tidak tahu orientasi politik luar negeri seperti apa, jadi saya kira itu perlu dilihat juga. Karena melihat yang disampaikan oleh Pak Kusnanto tadi itu, kalau kita ini bisa membuat hubungan dengan Vietnam berjalan dengan baik dan saling menguntungkan secara kuat memang dengan hubungan atau orientasi politik kita selama ini dengan yang regional 5 itu ada *rebalancing* mungkin, saya menanggapi tadi Pak Kusnanto. Karena kalau kita melihat *regional fair* inipun juga seperti Singapura dan Malaysia *toh* sudah bagian dari *power defence agreement*, dengan Inggris dengan Australia, sehingga mau diapa-apa pun juga memang perlu *partner* baru dalam *rebalancing power* di Asia Tenggara ini dalam konteks militer, dalam konteks pertahanan. *Cuman* masalahnya kan kita tadi, kita ini bukan masalah, kita sudah punya prinsip politik bebas aktif, tetapi bagaimana dengan *counterpart* kita?

Nah yang ketiga Pak, bagaimana Bapak melihat kalau kita ini sudah sering membuat hubungan kerja sama dengan negara-negara lain ya tadi mohon maaf Pak Reza kita anggap lebih unggul tadi itu. Apa tidak sebaiknya kita ini juga lebih asertif, lebih agresif membangun kerja sama dengan negara-negara yang mungkin secara umum dianggap *less advanced* begitu. Seperti misalnya apa dengan negara-negara Indo China yang lain atau mungkin dengan negara Pasifik Selatan misalnya, sehingga kerja sama militer atau pertahanan yang kita buat itu jelas lebih menguntungkan kita, sehingga untuk keperluan misalnya pengamanan Papua secara diplomasi, secara politik regional, kalau kita punya hubungan baik atau intens dengan negara-negara Pasifik Selatan, maka itu menjadi lebih menguntungkan untuk kita. Begitu juga dengan yang lain, kalau kita punya kerja sama militer dengan negara Indo China selain Vietnam ya kita anggap *less advanced* tadi itu *less develop*, tetapi kalau kemudian punya hubungan militer mungkin bisa memanfaatkan itu industri pertahanan kita, mereka membeli Alutsistanya dari kita misalnya, dari PTDI kalau nanti sudah tidak bermasalah ya. Karena *kayak* sekarang sudah bermasalah itu Pak. Nah, semacam itu Pak, bagaimana potensi melihat kalau kita membuka kerja sama ini lebih intens dengan tadi yang kita anggap *less develop* itu?

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hanafi.

Mungkin terakhir dari saya Pak, saya tidak ada pertanyaan sesungguhnya Pak, saya hanya ingin penegasan, karena sikap politik dari kita ketika kita melakukan pembahasan dengan Pemerintah nanti pada waktunya itulah yang akan menjadi pijakan dari Pemerintah, apakah mereka akan lanjut dengan rencana kerja sama ini diformalkan dalam bentuk Undang-Undang atau tidak. Nah, masukan dari Bapak-Bapak sebagaimana yang kita ikuti dari awal, sebenarnya kalau saya bisa resumekan semuanya kan menunggu, tetapi versinya kan beda-beda. Ada *support with cation*, jadi kita dukung, tetapi harus hati-hati dalam bidang ini, ini, dan seterusnya. Nah, jadi kalau dari saya, saya hanya penegasan saja, menurut Bapak-Bapak yang terhormat perlu tidak Rancangan Undang-Undang ini kita ratifikasi menjadi Undang-Undang? Jika ada *point-point* yang sifatnya *major*, itu *point-point* apa saja yang harus kita bawa ketika kita melakukan pembahasan dengan Pemerintah pada waktunya nanti?

Silakan kembali dari yang paling muda mungkin, siapa yang paling muda, silakan.

PAKAR (Dr. KUSNANTO ANGGORO):

Terima kasih Pak.

Ini ada *generation* Pak, kita ini *generation X* ya bang ya, yang W yang lahir tahun 1980-an, Pak Hanafi jenis yang kedua ya? Oke, terima kasih Pak Bobby, Pak Hanafi, dan Pak Tantowi Yahya.

Perihal intelijen dalam dokumen itu ada klasifikasi kan Pak, *top secret, confidential, and secret*. Dalam pandangan saya Pemerintah Indonesia itu punya kalkulasi mana yang masuk itu, ini tidak dibuka, bahkan di kalangan mereka pun mereka tidak bilang saya punya informasi *top secret loh*, tidak. Ya mungkin harus kita *bikin* sekaligus menjawab pertanyaan Pak Tantowi dalam menjawab urusan ini kita oke setuju dengan Pemerintah, kita *teken* MoU ini jadikan Undang-Undang, tetapi yakinkan kami *dong* anda punya *blue print*, anda punya *road map*, anda punya *plan of action* Pak, *blue print, road map, plan of action*.

Kemudian juga dalam peringkat *level of confidential* tersebut tentunya kan negara tidak akan sembarangan membagi rahasia mereka terlebih lagi kalau itu merupakan *indigent technology*, saya yakin penelitian yang murni Indonesia, misalnya penelitian PT. DI itu tidak akan dikasih, kemudian persenjataan khusus yang kita pakai, sehingga Kopassus *kok* bisa menang terus dalam adu tembak menembak itu tidak akan kita kasih Pak. Jadi tentunya kita harus ingatkan dahulu kepada TNI kalau berbicara soal pemberian data intelijen ya nenek moyang kita mengatakan ya *waspodo purwowiseso* Pak, dan *ngerti sakdurunge winarah* Pak. Jangan sampai teknologi yang kita bagikan tersebut *level*-nya dipertinggi oleh dia dan nanti teknologi tersebut memiliki muatan-muatan ekonomi, nanti tahu-tahu kita kalah *set* begitu. Dan harus diakui, Vietnam ini negara yang belajarnya cepat dan mereka sudah punya *programatic action*.

Jadi mohon dalam kerja sama pertukaran data intelijennya jangan langsung masuk ke *top secret*, ada tahapan, *secret* dahulu. Namun sebelum kita membagi-bagi data intel dengan pihak lain ya tentunya kita harus bertanya kepada diri sendiri, misalnya bagaimana level intelegen *awareness* Indonesia? Karena dari pengamatan-pengamatan saya, aparaturnya TNI itu kalau berhubungan mereka menggunakan jalur yang tidak steril, mereka menggunakan jalur Yahoo, jalur Google Pak, dan terus terang mereka *sharing* data-data intelijen ataupun data-data mentah yang dapat dirubah oleh pihak operator menjadi data intelijen.

Jadi mohon sebelum kita berbicara intelijen *sharing*, pekerjaan rumah kita ya urusan dalam TNI Polri, Kemhan, dan kementerian Teknis membenahi dahulu urusan dalam kita, dalam kita berhubungan dengan negara lain.

Selanjutnya apakah orientasi politik luar negeri Vietnam? Saya tidak tahu persis, jadi bagaimanapun saya adalah seorang realis Pak. Negara manapun di dunia, entah apakah dia komunis dan bukan komunis, itu prinsipnya kalau menguntungkan bagi mereka dalam jangka panjang, itu mereka lakoni. Deng Xiaoping pernah bilang terserah itu kucing warnanya apa, pokoknya bisa menangkap tikus, saya pikir Vietnam juga sama, dia punya *defence align* dengan Amerika Serikat dan kita juga *happy-happy* saja kan? Karena dengan adanya *defence align* dengan dia kan ada dampak tidak langsung kepada diri kita Pak.

Kemudian harapan Pak Hanafi Rais agar kita memiliki juga kerja sama *defence* dengan negara-negara yang *less develop*, yang *less sophisticated*, seperti *South Pacific Forum* dan Laos, Myanmar, dan Kamboja. Urusan *defence* dengan *South Pacific Country* itu agak sensitif, karena mereka itu binaan Australia dan Selandia Baru dan dua Datuk itu sangat sensitif Pak,

kalau kita mau masuk ke sana. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan, ya *incremental approach*, pelan-pelan, misalnya di Sesko TNI, Sesko Angkatan, selalu ada Anggota dari ASEAN, tetapi saya jarang sekali melihat Anggota dari, dari Fiji ada, tetapi tidak *continue*. Kenapa tidak kita undang dahulu mereka, sehingga tercipta suatu rasa, bahwa Indonesia adalah lebih *South Pacific* daripada Australia dan Selandia Baru tersebut.

Saya sangat khawatir dengan aspek *sensitify* dari Australia dan Selandia Baru, *defence relation* dengan Laos, Myanmar, dan Kamboja sudah ada, misalnya saya melihat Kopassus sudah berhasil melatih Perwira-perwira dari Laos, kemudian juga Perwira-perwira dari Kamboja, dan harus kita akui negara-negara Indo China ini belajar sangat cepat Pak. Jadi begitu mereka mendapat dasar-dasar pelatihan dari Batu Jejer Pak, langsung mereka operasikan daerah perbatasan dengan Thailand, langsung Thailandnya ngeri. Karena begitu ajaran Kopassus dipraktekkan oleh tetangga dia di perbatasan itu formasinya Angkatan Bersenjata, Thailand *ngeri* Pak.

Jadi saya tutup dengan Pak Tantowi Yahya, kita setuju, karena kita tidak punya masalah militer, masalah politik dengan Vietnam. Namun *you* hendaknya buat dahulu *blue print*, buat dahulu *road map*, buat dahulu *plan of action*, dan juga membuat klasifikasi intelijen itu seperti apa dalam urusan dengan Vietnam.

Terima kasih Pak.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., MBA., CFE.):

Pimpinan, boleh penajaman?

Pak, itu yang ingin kita tanyakan, karena *road map* itu di-*bikin*-nya setelah ada Undang-Undang Pak. Nah, ini yang kita ingin, bahwa apakah lebih baik jadi MoU saja, karena kalau adanya MoU, ya mau-maunya kita saja, informasi tidak seimbang boleh, tetapi kalau jadi Undang-Undang, nah ini kan akan memunculkan protokol Pak. Contohnya, kalau sekarang misalkan dengan adanya Undang-Undang itu ada kewajiban mengalokasikan anggaran, paling gampang saja kunjungan kerja, lantas pembelian Alutsista. Nah, pembelian contohnya kita ini masih menggunakan Vietnam ini sebagai alternatif sekarang untuk alternatif *maintenance* helikopter. Kalau dahulu kita diembargo F-16 kita masih bisa beli curi-curi dari Thailand. Nah, nanti kalau ini sudah menjadi Protokol, itu memang dialokasikan ya, memang membina hubungan baik kita harus beli, apalagi sekarang KW2-nya Rusia kan lagi perang, pasti kita ke sana.

Lantas yang kedua, paling utama lagi dengan kalau dijadikan Undang-Undang Pak, ada Protokol Kerja Sama Pertahanan itu latihan. Nah, ini yang kita tidak ingin pelatihan ini membuka Vietnam itu menjadi proxy Amerika. Karena kita tahu, Vietnam itu kan masternya gerilya *warfare*, kita itu Indonesia masternya *jungle warfare* yang sampai sekarang latihan gabungan di Indonesia oleh tentara Amerika marinir itu selalu ditunggu, *cuman* kita tutup-tutupin, tetapi kalau nanti kita sama Amerika sudah ada 1 latihan di tempat yang kita tentukan tidak bisa masuk, dengan Vietnam dua, dengan sendirinya volume latihan membuka kita terhadap kemampuan *jungle warfare* kita itu akan menambah.

Nah ini yang mau kita tanyakan, kalau di MoU kita bisa ngatur-ngatur maunya kita, ya sudah *deh* latihan sama Amerika dengan Vietnam jadikan saja 1, tetapi kalau jadi Undang-Undang Pak, karena bilateral, Vietnam 1, Amerika 1, Singapura 1. Semuanya ada Amerika lama-lama kebuka juga kita, karena lokasinya kan pindah-pindah, walaupun sudah kemarin Panglima

sudah mengatakan ya kita tidak daerahnya itu mereka tidak boleh pilihlah, hanya kita yang boleh pilih. Nah, dengan menjadi protokol resmi, kalau MoU menjadi Undang-Undang apakah ini kita masih bisa bermanuver-manuver lagi. Jadi paling tidak dengan jadi Undang-Undang sudah pasti *volume* latihannya bertambah Pak.

Terima kasih.

PAKAR (Dr. KUSNANTO ANGGORO):

Memang disinilah pentingnya nego sama Pemerintah Pak, terus terang dalam suasana politik sekarang yang legislatif *heavy*, Pemerintah sebenarnya agak ngeri sama Parlemen Pak. Saya pikir tidak ada salahnya kalau Pemerintah belum memiliki *blue print, road map*, maupun *plan of action* yang dia katakan akan nanti kita buat setelah Undang-Undang itu jadi, minta *dummy-nya dong*. Karena bagaimanapun kan buntut-buntutnya, kan larinya Undang-Undang itu ke Parlemen juga, ratifikasi terakhir. Memang untuk itu perlu kewibawaan menghadapi Pemerintah. Harus ada negosiator yang bisa *head to head* dengan Pemerintah.

Kemudian perihal protokol latihan, kemudian dengan *jungle warfare*, kemudian gerilya warfare, dengan data intelijen yang sekarang Pak, kita tidak bisa lagi mengatakan kita masih punya rahasia itu, dengan teknologi *remote sensing* yang sudah demikian tinggi mereka bisa baca Pak. Pada tahun 1985 *remote sensing* itu sudah bisa baca itu plat nomer di mobil VW, sekarang kalau kita *check* dengan *Google Map* misalkan, kita hubungkan dengan kata "*real estate*" Pak, kita mau beli rumah di Australia, kita bisa lihat ubin Pak, ubin di halaman garasi, dan mohon kita ingat namanya informasi intelijen itu dimiliki oleh militer. Dan menurut hemat saya, kita ini sudah terbuka, yang belum terbuka adalah apa yang ada di dalam benak kepala kita, maka untuk itu mohon para elit kita janganlah kita mengobrol data intelijen kemudian agar kita senantiasa membangun intelijen *awareness* Pak. Sehingga dengan demikian, ya kita memiliki *bargaining* dengan mereka Pak, nah semoga terjawab Pak.

Terima kasih Pak.

F-PD (MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA):

Saya sedikit informasi Pak, daerah tropis seperti di Indonesia 2 musim, itu memiliki spesifikasi yang berbeda, seperti negara-negara di Timur Tengah. Alat deteksi di Timur Tengah itu bisa bekerja maksimal, sedangkan untuk daerah tropis Pak, itu tidak bisa maksimal. Itulah sebabnya kenapa Amerika pada saat perang Vietnam menggunakan zat kimia serbuk kuning untuk merontokan daun, daun yang hijau-hijau itu Pak. Itu mencegah alat deteksi dari satelit itu menembus sampai ke bawah. Nah, itulah bedanya kita dengan di Timur Tengah, di Timur Tengah di dalam tanah dia bisa lihat Pak, untuk daerah tropis Pak, dia tidak bisa lihat kalau kita berlindung di pohon, itu kelebihan kita, itu satu.

Yang kedua, Indonesia negara tropis banyak sungai Pak, kenapa perlindungan orang Vietnam, setiap kali dia *bikin* perlindungan di dalam tanah itu pintunya pasti di sungai, sebab dengan sungai itu akan merubah suhu tubuh, sehingga sulit dideteksi. Nah, itu keunggulan daerah tropis. Jadi kalau perang hutan rimba memang Indonesia punya kelebihan di situ, kenapa? Karena didukung oleh alam yang ada. Saya kira itu Pak informasi saya.

PAKAR (KOLONEL INF. Dr. Rer. Pol. RODON PEDRASON, M.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Ini pernyataan Pak Bobby menarik, apakah Vietnam bisa menjadi proxy? Saya jawab bisa, karena sebetulnya bukan hanya dari sisi militer, hubungan Indonesia dengan negara lain itu bisa menjadi proxy, bahwa keputusan politik sekalipun bisa menjadi proxy. Saya ambil contoh yang paling mudah saja, Pemerintah China ini menurut penilaian saya menjadikan Pemerintah kita sebagai proxy mereka di dalam membuat kebijakan terhadap bangsa kita. Mereka memberikan bantuan dana, uang dengan jumlah tertentu, kemudian membuat syarat-syarat tertentu agar uang itu bisa dipergunakan oleh kita. Nah, Pemerintah kita setuju. Salah satunya misalnya boleh negara kita menggunakan katakanlah buruh dari China, kemudian harus menggunakan peralatan dari China, itu proxy Pak.

Jadi kalau kita katakan, apakah Vietnam bisa menjadi proxy dari Amerika? Bisa, tetapi seperti apa kita mensiasati proxy, inilah yang diperlukan dalam bentuk kerja sama. Karena dalam kerja sama militer saat ini tidak ada lagi satupun rahasia yang bisa kita simpan. Yang bisa kita simpan dalam kerja sama militer adalah tinggal bagaimana budaya kita, bagaimana *habit* kita, bagaimana kebiasaan keseharian kita yang tidak mungkin ditiru oleh mereka. Karena itu merupakan perilaku keseharian yang tidak bisa ditiru oleh seseorang secara tiba-tiba. Saya ambilkan contoh lagi misalnya, saat ini apabila ada latihan antara Indonesia dengan Australia di pusat pendidikan Infanteri yang ada di Ciputat sana, itu pihak Australia tidak mau lagi menggunakan *shower* untuk mereka mandi, mereka tidak mau lagi menggunakan toilet duduk seperti orang *bule*, tetapi mereka meniru semua perilaku bangsa Indonesia, mandi menggunakan *ciduk*, tidur tidak disediakan kelambu, kemudian mereka menggunakan toilet jongkok. Mereka mencoba melakukan hal yang seperti itu untuk melihat seperti apa sih sebetulnya semangat juang prajurit kita di dalam menghadapi situasi yang paling sulit dan *alhamdulillah* mereka tidak pernah bisa sampai ke tahap itu. Sebab mereka tidak betah menggunakan toilet jongkok, mereka tidak betah tidur tanpa menggunakan kelambu, karena mereka takut malaria, dan terutama mereka tidak bisa berbaur kepada masyarakat menggunakan pola-pola pendekatan yang kita pakai. Kultur yang kita kembangkan dalam berbagai operasi, entah itu di dalam negeri kita, maupun di luar negeri, itu kita selalu bawa dan menjadi kata kunci, bahwa militer kita bisa diterima dimanapun dan tidak satupun militer di dunia ini yang mampu meniru kultur kita. Karena kultur berkembang dari lingkungan kita, kultur berkembang dari geografik kita, kultur berkembang dari memang perilaku kita. Proxy bisa dilakukan, tetapi tidak akan bisa menyentuh persoalan dasar.

Jadi menurut saya kita tidak perlu *parno* mengenai masalah proxy, karena semua informasi, entah itu intelijen, informasi kegiatan, itu bisa didapatkan dari mana saja. Entah menggunakan Google, entah menggunakan berbagai tulisan yang kebenarannya bisa mendekati 90%. Namun satu, apabila kita menggunakan saluran resmi, berupa katakanlah satelit, entahkan itu kerja sama antar telekomunikasi, satu yang perlu kita pegang dalam ini, jangan pernah kita membiarkan pihak asing mendapatkan akses kepada *customer service profile*, karena apabila dia mendapat akses seperti yang sekarang antara Telkom dengan Singtel itu sama dengan kita menelanjangi diri kita bulat-bulat. Sebab pihak yang bekerja sama dengan kita legal secara hukum untuk meneliti apa isi pembicaraan kita.

Jadi dalam menyikapi berbagai kemungkinan proxy ini, kita harus tahu secara pasti kira-kira posisi-posisi mana, kira-kira point-point mana yang bisa menembus atau merekam secara

pasti kelemahan kita, karena kalau kita tidak bekerja sama, kita tidak hidup di dunia modern. Dunia yang berkembang saat ini merupakan dunia interdependis, negara yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, tidak ada satupun negara di dunia ini bisa berdiri sendiri. Kalau kita menyatakan Korea Utara berdiri sendiri, tidak, Korea Utara justru sekarang merupakan proxy Amerika Serikat, bukan lagi Korea Selatan yang menjadi proxy Amerika, itu fakta yang kita lihat.

Jadi kita tidaklah boleh menghindar dari perkembangan situasi saat ini, tetapi perlu mensiasati kira-kira kelemahan kita dari sisi mana, agar kita bisa meminimalisasi kelemahan kita, kebocoran berita, kebocoran rahasia yang berkaitan dengan hubungan bilateral kita. Tidak ada yang bisa kita tutupi 100%, tetapi saya memiliki semua keyakinan, bahwa kultur kita tidak bisa ditiru oleh budaya manapun. Tidak usah jauh-jauh, *bule* segala macam, bahkan barangkali Melayu pun tidak akan bisa meniru perilaku kita dalam pola-pola komunikasi maupun operasional yang akan kita lakukan, jadi saya yakin. Belum lagi kalau kita bicara tentang masalah pembelian Alutsista kalau selama ini kita berpikir tentang masalah keputusan politik, birokrasi, kemudian masalah doktrin, tetapi sebetulnya yang paling penting menurut saya adalah spesifikasi yang paling *crucial* di dalam peralatan, karena sesuatu peralatan yang terbaik belum tentu peralatan yang tepat untuk kita pergunakan. Peralatan yang tepat untuk kita pergunakan belum tentu merupakan kualitas terbaik, tetapi itu yang kita perlukan, tinggal itu yang kita lihat, yang betul-betul *security nice* seperti apa, kita tidak membabi buta membeli. Wah, kita lihat, oh tank Leopard paling bagus, belum tentu cocok dengan kita, cocok barangkali di Jakarta, tetapi tidak cocok di Kalimantan.

Jadi misalnya segala macam kita lupa mempertimbangkan 3 hal, seperti di dalam pengadaan, faktor geografi, faktor *capacity basing*-nya, kemudian satu lagi masalah spesifikasi peralatan, lupa kita 3 itu. Kita cenderung mengatakan masalah birokrasi, politik, dan doktrin, tetapi lupa masalah kebutuhan personal kita yang mengoperasikan peralatan itu. Kita selalu mengembor-gemborkan tentang *transfer of technology, that's fine*, memang betul, tetapi ada hal penting yang berkaitan dengan kebutuhan personal yang mengawaki peralatan. Ini menurut saya ya pelan-pelan Pak kita benahi ini, biar kita itu tepat. Saya yakin tentang kultur tidak bisa ditiru.

Lalu apakah Vietnam dapat membuat Pakta Pertahanan seperti pertanyaan Pak Hanafi? Belum ada Pak yang melarang, bahwa ASEAN bisa membentuk Pakta Pertahanan tidak ada. Karena Pakta Pertahanan itu sendiri pernah terjadi pada tahun 1950-an, yaitu SEATO (*South East ASEAN Treaty Organization*), namun pada saat itu hanya 2 negara ASEAN yang menjadi Anggota SEATO, yaitu Thailand dan Philipina, sehingga tidak berusia lama. Itu klausul-klausul yang ada di situ termasuk pasal-pasal yang ada di dalam perjanjian atau perjanjian SEATO sangat persis sama dengan yang ada di NATO, tetapi itu tidak pernah berhasil, karena memang keputusan membuat sebuah Pakta Pertahanan atau tidak bukan berlangsung dari keinginan negara, tetapi lebih kepada pelaku negara dalam hal ini pemimpin atau penyelenggara negara.

Nah, apabila memang kesepakatan sebuah kawasan ini, mari kita membentuk sebuah Pakta Pertahanan, itu akan terjadi. Saya menemukan beberapa Pakta, bahwa berbagai bentuk kerja sama pertahanan sekarang ini berlangsung di ASEAN memenuhi elemen-elemen Pakta Pertahanan, hanya tinggal masalah *official* saja yang mengatakan belum ada. *Interoperability* berkaitan masalah sistem, *interoperability* berkaitan dengan masalah prosedural, *interoperability* berkaitan dengan masalah *human*, itu semua ada di dalam kerja sama pertahanan yang sudah dibangun di ASEAN.

Jadi kalau secara individu Vietnam tidak akan bisa membentuk Pakta Pertahanan, tetapi kalau bicara ASEAN sebagai sebuah *entity* atau entitas bisa terjadi, tergantung masalah kebijakan para pemimpin yang ada di Asia.

Terus ada pertanyaannya Pak Tantowi tentang perlukah kita ratifikasi atau tidak atau tetap hanya seperti MoU saja. Saya menyatakan bahwa di dalam Rancangan Undang-Undang ini memang ada kewajiban-kewajiban atau katakanlah tanggung jawab yang harus kita penuhi. Namun kekhawatiran-kekhawatiran tadi kita awali sebagai langkah awal, kita siapkan ... walaupun *blue print*-nya belum ada, kita siapkan terlebih dahulu. Jangan kita tunggu aturannya, bahwa Undang-Undang jadi dahulu bahwa *blue print*-nya kita siapkan, tidak. Kita mencoba membalik langkah, *unofficial* langkahnya, sehingga kita tahu mau dibawa kemana ini Undang-Undang kita. Karena kalau kita hanya bertahan di MoU saja, itu sifatnya sangat tidak mengikat Pak, itu mudah keluar kanan kiri dan segala macam, karena itu sifatnya hanya bilateral, tetapi kalau kita berbicara masalah rencana sebuah Undang-Undang, itu sifatnya internasional, akhirnya tidak bisa lepas begitu saja.

Jadi menurut saya apa yang perlu disiapkan sama seperti Pak Teuku Rezasyah, kita mulai dari awal Pak, kita balik langkahnya, walaupun itu sifatnya tidak formal agar langkah kita tidak langkah kosong, tidak melangkah tanpa ada tuntutan sebelumnya.

Saya kira itu jawaban saya Pak, terima kasih.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., MBA., CFE.):

Pak, kiranya kalau misalkan kita mintakan ini sebagai syarat ke Pemerintah, bahwa ada dahulu *blue print* yang belum *unofficial* apakah bisa? Karena nanti sama juga Pak, kalau yang tetangga sebelah kan rekamnya diam-diam, kalau ini direkam Pak. Nah, jadi kalau misalkan kita minta *unofficial* itu nanti itu etis apa tidak?

Terima kasih.

PAKAR (KOLONEL INF. Dr. Rer. Pol. RODON PEDRASON, M.A.):

Begitu Pak, berbicara tentang masalah etis atau tidak etis, saya bilang mungkin tidak Pak, karena memang langkah-langkahnya tidak bisa seperti ini, tetapi pendekatan *personal* itu menurut saya perlu. Paling tidak walaupun tidak ada dalam bentuk tertulis, tetapi *personal* yang berkaitan langsung di dalam merancang Undang-Undang ini harus kita tahu secara pasti siapa orangnya. Kita harus tahu secara pasti pola pikir apa yang akan dia masukan di sini, kita harus merekam itu. Walaupun tidak boleh barangkali kita catat, tetapi paling tidak kita tahu si A, dia membuat rencana begini-begini, kita kan bisa *absorb* seseorang, sehingga kita bisa tahu, ini nanti bermanfaat atau nanti menjadi moderat buat bangsa kita. Saya kira hanya itu saran yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Silakan Pak Kus, yang terakhir.

PAKAR (Dr. KUSNANTO ANGGORO):

Mohon maaf sebelumnya, saya agak bingung sedikit ini Rancangan Undang-Undang, tetapkan sebenarnya yang menjadi Undang-Undang itu kan status politiknya. Nah, kemudian yang menjadi ratifikasi melalui Undang-Undang, tetapi substansinya bukannya *Memorandum of Understanding* ya kan, kira-kira begitu, maaf ya.

Jadi untuk itu, saya kira ya ini sekali lagi untuk klarifikasi saja ya, jadi kan ini nanti tetap *Memorandum of Understanding*, meskipun dalam konteks Indonesia ini menjadi Undang-Undang. Dalam pengertian, bahwa ratifikasinya dilakukan melalui Undang-Undang. Maka tadi di bagian awal, saya justru mengatakan bahwa ini sebenarnya merupakan sesuatu yang bagus dalam proses demokrasi, jadi tidak terlaui terkait dengan substansi memorandumnya, tetapi dalam proses *check and balances* antara Pemerintah dan DPR. Karena di dalam bayangan saya, sesuatu yang sifatnya *technical* itu terbatas kepada kurang lebih tingkat dengan *Memorandum of Understanding* seharusnya ratifikasinya bisa menggunakan Keputusan Presiden, ada beberapa. Kalau menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, Undang-Undang Perjanjian Internasional. Jadi ini kan diangkat statusnya menjadi lebih baik, lebih baik dalam pengertian lebih demokratis, ada *involvement* dari DPR dan seterusnya, memberi akses kepada DPR untuk mempertimbangkan a,b,c,d untuk menolak dan sebagainya.

Jadi untuk saya manfaat paling besar dari ratifikasi ini sesungguhnya adalah dalam proses politik di Indonesia. Tentu akan membawa implikasi dalam konteks hubungan Indonesia dengan Vietnam, tetapi itu persoalan yang sebenarnya terpisah. Karena antara tahun 2010 sampai sekarang, toh ini juga sudah jalan segala sesuatunya, tetapi DPR tidak punya akses untuk katakanlah meminta pertanggungjawaban Pemerintah, karena statusnya hanya sebagai MoU dan bukan Undang-Undang.

Jadi sekali lagi ini adalah langkah maju dari segi proses demokrasi, bahwa substansinya ada minus positifnya, kita harus antisipasi dan seterusnya, tentu betul. Bagi saya sulit untuk membayangkan kalau DPR pada tahap ini tanpa ini dijadikan Undang-Undang untuk bisa meminta *blue print*. Saya setuju dengan pandangan kalau *blue print* yang disusun oleh Pemerintah baru bisa disusun kalau Undang-Undangnya sudah disahkan, kira-kira itu. Maka ini menjadi persyaratan saja ketika nanti katakanlah memberikan catatan atau pada saat menetapkan Rancangan Undang-undang ini menjadi Undang-Undang diberi semacam catatan dari DPR kepada Pemerintah. Beberapa yang tadi dipersoalkan oleh Pak Gamari misalnya itu ditambahkan di catatan DPR, termasuk memberi kewajiban kepada Pemerintah untuk bisa mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan yang terkait dengan Undang-Undang, terkait dengan MoU. Jadi itu intinya posisi politiknya saya kira itu.

Yang ketiga, saya juga sepakat untuk ini dijadikan menjadi Undang-Undang, karena ini sebenarnya justru memberi akses kepada DPR, kepada rakyat untuk bisa mempersoalkan apapun yang dilakukan oleh Pemerintah, termasuk kontrol ketika tadi misalnya DPR atau Komisi I DPR RI atau Sub Komisi Intelijen Komisi I DPR RI ingin mempersoalkan tentang apa saja yang terkait dengan intelijen *sharing*. Karena ini kan tidak ada barangnya di sini, hanya terbatas pada pernyataan, bahwa termasuk sesuatu yang akan menjadi bagian dari kerja sama antara Indonesia dengan Vietnam, disebut tentang informasi, data, dan intelijen. Kita tidak tahu apa yang dimaksud, apakah pengertian intelijen di Indonesia yang kalau menurut Undang-Undang Intelijen itu terdiri dari kegiatan fungsi dan organisasi sama seperti apa yang dimaksud di Vietnam, belum tentu, intelijennya sama, tetapi isinya belum tentu kan begitu. Dan yang kedua

adalah umumnya nanti pasti akan membutuhkan berapa dalam bentuk program. Programnya kan lagi-lagi sekitar itu juga, misalnya adalah *capacity building*, kedua adalah *sharing of information*, ketiga adalah untuk menghadapi misi-misi tertentu, misalnya adalah terkait dengan terorisme dan sebagainya. Nah, ini yang nanti akan ditetapkan oleh Komite Bersama antara Indonesia dan Vietnam.

Jadi saya tidak terlalu khawatir Pak Bobby, justru dengan adanya ini ditetapkan sebagai Undang-Undang untuk ratifikasi nanti DPR dapat mempunyai akses dan bertanya kepada Pemerintah. Kalau kira-kira Pak Bobby bisa bertanya, apa yang anda maksud dengan ini, bagaimana *blue print* intelijen *sharing* atau intelijen *corporation* dengan Vietnam dan seterusnya.

Jadi saya tidak terlalu cemas tentang itu, *cuman* asal kerja dengan baik, saya kira persoalannya justru ada di kita, misalnya kita tidak punya ketegasan terkait dengan informasi intelijen, dua, kita tidak mempunyai pengaturan yang baik mengenai perlindungan informasi strategis, saya tidak menyebut Undang-Undang Rahasia Negara, tetapi saya menyebutnya sebagai perlindungan informasi strategis, jadi sebenarnya kelemahan kan ada di kita. Bukan tidak mustahil kalau ini ada nanti justru akan menggelindingkan bola lama yang dahulu disebut sebagai rahasia negara, tetapi saya selalu ingin menyebutnya sebagai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Informasi Strategis, karena itu lebih demokratik, lebih komunikatif dan lebih memberikan kewajiban kepada Pemerintah daripada mengorbankan rakyat banyak. Itu saya kira akan menjadi ide yang lebih bagus.

Tentang proxy-proxy, saya kira saya tidak perlu jawab, saya ingin suatu saat, saya kira kita bisa mengambil sesuatu dari kerja sama itu, termasuk dengan Vietnam.

Tentang orientasi Vietnam Pak Hanafi, saya juga tidak terlalu risau, yang paling sulit itu menjadi orang kaya dan orang kuat, temennya orang kaya dan temennya orang kuat itu juga tidak enak. Yang paling nikmat itu menjadi teman-temannya orang kuat dan teman-temannya orang kaya. Jangan-jangan Indonesia seperti itu, jadi orang lain boleh *bikin* Pakta asal bukan kita.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kusnanto.

Ini penjelasan dari Bapak ini sebenarnya banyak yang di luar prediksi kami. Jadi *beyond our expectation*. Jadi ketika Bapak berbicara, bahwa maksud dari Ratifikasi MoU ini adalah sebagai niat baik dari Pemerintah dalam kaitan menciptakan hubungan yang lebih baik antara legislatif dan eksekutif, karena dengan menjadi Undang-Undang, maka kita DPR mempunyai akses untuk terlibat di dalam pengawasan khususnya dan pada waktunya nanti adalah dalam hal penganggaran, karena konsekuensi logis atau konsekuensi konstitusional dari Undang-Undang nanti adalah APBN. Namun di sisi lain Pak, kita juga harus sadar ketika Bapak di sisi Pemerintah, kinerja Pemerintah itu salah satu dilihat dari berapa jumlah MoU yang diratifikasi, kan begitu juga. Kemudian negara dimana kita sudah membangun MoU pasti setiap kali ada pertemuan bilateral maupun multilateral pasti itu yang ditanya, eh bagaimana ini MoU, kapan diratifikasinya?

Jadi perspektif ini yang kita lihat jadi kepentingan Pemerintah juga besar sekali mengapa MoU ini harus ditingkatkan menjadi Undang-Undang. Namun kami sepakat dengan Bapak, bahwa *there is no harm* untuk meratifikasi ini sebagai suatu Undang-Undang sebagai suatu

pijakan kita dalam kaitan kerja sama di bidang pertahanan dengan Vietnam. Namun masukan-masukan dari Bapak tadi, *wabilkhusus* dari Pak Reza mengenai ketidaktelitian dari Naskah Akademik yang berakibat fatal, itu menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan bersama.

Jadi kondisinya jelas, misalnya kita meratifikasi, maka persyaratan-persyaratan, kondisi-kondisi sebagaimana disampaikan Bapak bertiga tadi menjadi catatan penting bagi kami. Tidak ada keputusan Pak dalam RDPU ini, karena sejatinya kita hanya *brain storming* di sini, kita ingin mendapatkan beberapa pendalaman dari Bapak-Bapak yang terhormat yang menjadi modal bagi kami ketika kami melakukan pembahasan secara intensif kepada Pemerintah pada waktunya nanti.

Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rodon, Pak Kusnanto Anggoro, dan Pak Teuku Rezasyah atas semua masukan, *input, inside* yang sudah diberikan kepada kami dan ini menjadi masukan berharga bagi kami untuk pembahasan lebih lanjut. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, termasuk kita molor 30 menit kurang lebih dari jadwal yang sudah kita sepakati bersama.

Kami tutup RDPU ini dengan mengucapkan *alhamdulillah* dan saya tutup dengan mengucapkan *alhamdulillah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

(RAPAT DITUTUP)

Jakarta, 30 November 2015
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

WAZIR, S.E., M.M.
NIP. 196901221999031002